

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HUKUMAN
CAMBUK BAGI NON MUSLIM SEBAGAI PELAKU
JARIMAH KHAMAR
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh
Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Ilmu Syari'ah dan Hukum

OLEH:

AINA SALSABILA

NIM. 23133003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
JURUSAN SIYASAH
MEDAN
1438 H /2017 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aina Salsabila

Nim : 23.13.3.003

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Siyasah

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS HUKUMAN CAMBUK BAGI
NON-MUSLIM SEBAGAI PELAKU
JARIMAH KHAMAR (Analisis Terhadap
Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon
Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi diatas adalah benar/asli hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 7 Agustus 2017,

Yang membuat pernyataan,

Aina Salsabila

Nim: 23133003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/Jn/2016/Ms-Tkn)”***.

Selanjutnya, shalawat beriring salam penulis lafazkan kepada junjungan umat baginda Muhammad SAW, *Allahumma shalli wasallim ‘ala Sayyidina Muhammad*.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat kepada orang-orang yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Drs. Taufik Ridha dan Ibunda Dra. Hamini, yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayang yang tulus dan memberikan

dukungan moril maupun materil. Tetesan keringatmu merupakan mesin motivasi bagiku.

2. Abangda Mahdial Hady, SH dan Adindaku Ummu Abiha, yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham S.H.I. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibunda Fatimah, MA selaku Ketua Jurusan Siyasah sekaligus Penasehat Akademis dan Dr. Dhiauddin Tanjung, MA selaku sekretaris jurusan.
6. Bapak Dr. M. Iqbal Irham, M. Ag dan Ibu Afifa Rangkuti SH M. Hum selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik dan arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/ibu dosen dan staff di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Kepada seluruh sahabat-sahabat Jurusan Siyasah angkatan 2013 yang telah banyak membantu serta senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis, tidak lupa juga rekan-rekan mahasiswa

syari'ah dan rekan-rekan di luar kampus, karena telah senantiasa menolong penulis. Semoga Allah memudahkan urusan kalian semua.

9. Kemudian kepada pihak-pihak terkait yang membantu penulis baik itu secara pikiran, tenaga maupun materil.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan kepada para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Medan, 25 Agustus 2017

Penulis

AinaSalsabila

Nim. 23 13 3 003

IKHTISAR

Aina Salsabila, 23133003. Judul: Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah *Khamar* (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/jn/2016/Ms-Tkn). Hukuman Cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan Syari'at Islam di Provinsi Aceh. Hukuman cambuk dipandang sebagai hukuman yang sebanding untuk menjalankan roda pemerintahan Syari'at Islam. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku tindak pidana khamar non muslim. Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan, yaitu: *Pertama*, bagaimana Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh tengah dalam menjatuhkan hukuman cambuk dalam putusan No. 01/JN/2016/MS-TKN? *Kedua*, Apakah Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh tengah No. 01/JN/2016/MS-TKN tentang *jarimah khamar* telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini diarahkan pada penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yang bersifat deskriptif analitis dan interpretasi analitis, dimana bahan hukum primer yang dikaji adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Qanun Aceh, serta literatur lain yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Qanun Aceh mengatur tentang *jarimah khamar*, menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah terhadap pelaku *jarimah khamar* non muslim, serta melihat kesesuaian antara Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh tengah No. 01/JN/2016/MS-TKN dengan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk bagi non muslim sebagai pelaku *jarimah khamar* adalah Pasal 5 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian terdakwa dijatuhi hukum cambuk sebanyak 30 kali dimuka umum, dikurangi 47 hari masa tahanan dan putusan tersebut telah sesuai dengan Qanun Aceh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
IKHTISAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Masalah	14
3. Bahan hukum	15

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum	16
5. Metode analisis bahan hukum	16
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMAR DALAM ISLAM

A. Khamar Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Khamar	20
2. Dasar Larangan Khamar	25
3. ‘Uqubat bagi pelaku khamar dalam hokum Islam	30
4. Pandangan Para Ulama tentang Khamar	32

B. Khamar Menurut Qanun Aceh

1. Pengertian Khamar	39
2. Peraturan Qanun Aceh tentang Khamar	40

BAB III PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DI ACEH

A. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh	42
B. Lembaga-lembaga Pelaksana Syari’at Islam di Provinsi Aceh	53
1. Dinas Syari’at Islam	53

2. Wilayatul Hisbah.....	55
3. Lembaga Kepolisian	56
4. Lembaga Kejaksaan.....	57
5. Mahkamah Syar'iyah.....	58
C. Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Menurut Qanun Provinsi Aceh	60
D. Peraturan tentang berlakunya Qanun Aceh bagi non Muslim.	67
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	69
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 01/JN/2016/MS- TKN.....	69
a. Kasus posisi	70
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	71
c. Fakta hukum di peradilan.....	71
d. Dasar pertimbangan hakim	73
e. Analisis.....	81
B. Kesesuaian antara Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah dengan Qanun Aceh.	103

BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini akan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah paling ujung barat dari wilayah Indonesia. Dalam sejarah, kedatangan Islam telah menghasilkan beberapa karya yang komprehensif dan mendapatkan julukan Serambi Mekkah.¹ Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang telah diundangkan pemberlakuan Syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 yang memuat tentang pemberlakuan Syari'at Islam secara kaffah, memberikan kesempatan

¹ Syafruddin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), h. xi.

bagi provinsi Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara.²

Dalam agama Islam, pemberlakuan Syari'at Islam merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara totalitas tanpa adanya yang ditinggalkan.³

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".(QS Al-Baqarah: 208).

Adanya otonomi khusus bagi provinsi Aceh juga bukan sekedar memberikan otonomi khusus yang sedikit banyak berbeda dengan otonomi biasa, akan tetapi otonomi khusus tersebut akan memberikan implikasi di bidang ketata-negaraan, karena seperti yang telah diuraikan bahwa pemberian otonomi khusus oleh Undang-Undang disertai dengan hak kepada Pemerintah

²Misri A. Muchsin, dkk, *Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 1.

³Assunnah, *Memahami dan mengamalkan Islam secara kaffah sesuai tuntutan Rasulullah*, http://www.assunnah.mobie.in/artikel/islam_kaffah, diakses pada tanggal 17 Mei 2017, pukul 20.15 WIB.

Provinsi dan DPRD untuk membuat sendiri peraturan pelaksanaannya yang kemudian diberi nama Qanun.

Dalam perkembangannya, dapat disebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan suatu aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian kondisi setempat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka (8) “Ketentuan Umum” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam Undang-Undang ini Qanun dirumuskan sebagai: “Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam rangka Penyelenggara Otonomi Khusus”.⁴

Pada saat ini Aceh telah membentuk beberapa qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari’at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang

⁴Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

berisi tentang *khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qodzaf, liwath dan mushahaqah*.⁵

Salah satu aspek yang dapat mendukung terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan Aceh yang dipadukan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah sistem peradilan. Dengan dimaksukannya Syari'at Islam menjadi bagian dari urusan pemerintahan, dengan sendirinya melahirkan qanun-qanun yang bersubstansi syari'at yang membutuhkan peradilan sendiri, yaitu Mahkamah Syar'iyah.⁶ Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh".

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjalankan peradilan syari'at Islam di Provinsi Aceh yang kewenangannya didasarkan atas Syari'at Islam dalam kerangka sistem hukum nasional, dan kewenangan tersebut hanya berlaku untuk pemeluk agama Islam. Syari'at Islam

⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, h. 6

⁶Sufriana, H. Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama dalam sistem Peradilan Indonesi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 117.

yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah haruslah ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.⁷

Pada pasal 49 dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam, diperjelas mengenai kompetensi dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama yakni dalam bidang *ahwal asy-syakhsiyah, mu'amalah dan jinayah*.⁸ Salah satu perkara *jinayah* yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah adalah *Jarimah Khamar*.⁹

Secara umum, *khamar* diartikan dengan “segala sesuatu dari makanan atau minuman dan obat-obatan yang dapat menghilangkan akal dan memabukkan”. Sementara Qanun Aceh membatasi *khamar* hanya sebatas

⁷Al-Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), h. 21.

⁸Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam BAB III Kekuasaan dan Kehakiman Mahkamah Pasal 49.

⁹Menurut Qanun Aceh, *jarimah khamar* adalah pelanggaran terhadap minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar dari 2% (dua persen) atau lebih.

minuman yang memabukkan. Jadi, makanan dan obat-obatan yang memabukkan bukan termasuk *khamar* dalam Qanun Aceh.¹⁰

Qanun Hukum Jinayat telah mengatur tentang *Khamar* secara tegas dan melarang kepada siapa saja untuk mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Tidak hanya mengkonsumsi, badan hukum/badan usaha juga dilarang memproduksi, menyediakan, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, dan mempromosikan minuman *khamar* dan sejenisnya. Salah satu bentuk metode hukuman yang disebutkan dalam Qanun tersebut adalah hukuman cambuk. Bentuk hukuman cambuk merupakan bentuk penghukuman baru dalam perundangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran Syari'at Islam di Aceh.¹¹

Dalam kasus hukum cambuk yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, Remita Sinaga alias Mak Ucok, warga kampung baru kec. Lut tawar, kab. Aceh Tengah, merupakan non-muslim pertama yang menjalani eksekusi hukuman cambuk, pada hari Selasa, 12 April 2016. Berdasarkan putusan

¹⁰Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, h. 4.

¹¹ Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2009), h. 143

Mahkamah Syar'iyah Takengon, wanita berusia 60 tahun itu didakwa telah terbukti secara sah melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang menjual minuman keras (*jarimah khamar*). Mahkamah Syar'iyah Takengon memutus hukuman cambuk sebanyak 30 kali cambukan dipotong 2 kali di depan umum, karena sebelumnya Remita ditahan selama 47 hari.¹²

Berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, untuk kasus penjualan minuman keras yang diatur dalam Kitab Undang-Undang (KUHP), seorang muslim bisa mendapat sanksi dari Qanun, jika melakukan pelanggaran syari'at bersama-sama dengan orang Islam dan secara sukarela menundukkan diri (setuju) untuk dihukum dengan Hukum Jinayat. Dalam hal ini, non muslim boleh memilih antara hukum Syariat dan KUHP. Namun, jika pelaku non muslim ternyata sendiri dalam melanggar aturan syari'at, dalam arti tidak bersama orang Islam, maka penerapan Qanun telah keliru.¹³

¹²Yudi Rchman, *Nonmuslim Dihukum Cambuk, KY Pelajari Putusan Mahkamah Syariah*, http://kbr.id/04/2016/nonmuslim_dihukum_cambuk_ky_pelajari_putusan_mahkamah_syariah/80349.html, diakses pada tanggal 31 januari 2017 pukul 07.50

¹³Iwan Bahagia, *Warga Non muslim di Aceh Boleh Pilih Hukuman Syari'at atau KUHP*, <http://regional.kompas.com/read/2016/04/14/13151991/warga.nonmuslim.di.aceh.boleh.pilih.hukuman.syari'at.atau.kuhp>, diakses pada tanggal 17 mei 2017, pukul 20.20 WIB.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pertimbangan hakim dalam memutus hukuman cambuk bagi non muslim sebagai pelaku jarimah *khamar*, tulisan ini merupakan analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk dalam Putusan Nomor 01/JN/2016/MS-TKN?
2. Apakah Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk dalam Putusan Nomor 01/JN/2016/MS-TKN.

2. Untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), yakni untuk menambah dan memperluas serta memperkaya khazanah intelektual pengetahuan tentang hukum jinayat di Aceh secara umum dan tentang hukum cambuk *jarimah khamar* secara khusus. Lebih lanjut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian berikutnya.
2. Aspek terapan (praktis), yakni untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara yang sejenis dan bagi mahasiswa serta masyarakat khususnya masyarakat Takengon, tulisan ini dapat menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa literatur yang penulis jadikan sebagai

previous finding (penelitian maupun penemuan sebelumnya). Ada banyak karya ilmiah, baik berupa jurnal, buku maupun skripsi yang membahas tentang hukuman cambuk. Dari literatur tersebut, penulis mencoba mengaitkan dari beberapa kajian yang ada tentang permasalahan hukuman cambuk.

Untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan karya ilmiah yang pernah ditulis oleh mereka, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Husaini dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Cambuk Sebagai bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat)*.¹⁴ Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Hukuman cambuk dianggap melanggar hak asasi manusia serta merupakan hukuman yang kejam. Masyarakat dan kalangan praktisi hukum menanggapi pro kontra terhadap pelaksanaan peraturan daerah (qanun) tersebut yang dinilai diskriminatif, karena hanya membidik masyarakat kecil.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Willy Purnama Sari dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Tindak Pidana Minum-minuman Keras (Khamar) dan perjudian (Maisir) di Kota Langsa*

¹⁴ Husaini, “*Cambuk Sebagai bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat)*.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Aceh.¹⁵ Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara hukum Nasional dan hukum Islam yang diterapkan di Aceh. Pengkajian terhadap bahan dan data yang terkumpul, menunjukkan bahwa regulasi hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan di Aceh khususnya bagi peminum-minuman keras (*khamar*) dan judi (*maisir*). Dikarenakan hukuman cambuk memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik juga efek psikologis rasa malu yang mendalam.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sherly Herdiyanti Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul *Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun di bidang Maisir (studi Kasus di Kota Banda Aceh)*.¹⁶ Skripsi ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana Cambuk di Bidang *Maisir* belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun jumlah pelanggar qanun di bidang *maisir* mengalami peningkatan.

¹⁵ Willy Purnamasari, "Efektifitas regulasi hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana minum-minuman keras (*Khamar*) dan Perjudian (*Maisir*) di Kota Langsa Aceh." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

¹⁶ Sherly Herdiyanti, "Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang *Maisir* (Studi Kasus Kota Banda Aceh)." Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Dari beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa Penelitian Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah *Khamar* (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN) ini secara khusus belum pernah diteliti. Oleh karena itu penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian karena masih sangat layak untuk diteliti.

F. Kerangka Pemikiran

Bagi masyarakat Islam melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* baik dalam kehidupan pribadi atau masyarakat adalah perintah Allah. Karenanya melaksanakan Syari'at Islam merupakan kewajiban suci yang harus diupayakan dan diperjuangkan sebagai penyempurnaan iman dan tunduk kepada hukum Allah.

Salah satu tujuan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh ialah terwujudnya keadilan dalam pemerintahan masyarakat Aceh. Maka pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sangat bergantung pada peran pemerintah sebagai perencana, penggerak, pemberi fasilitas utamanya serta peran masyarakat sebagai partisipan penuh dalam pelaksanaan Syari'at Islam, sehingga hasil akhir dapat dicapai sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat dan Pemerintah Aceh. Peran pemerintah sebagai pembuat aturan (Qanun) yang materi muatannya

berdasarkan syari'at Islam dan peran penegak hukum sebagai alat yang menjalankan dari pada aturan tersebut seperti *Wilayatul Hisbah*, Polisi, Penyidik, Jaksa, Hakim dan Mahkamah Syar'iyah selaku lembaga hukum menjadi tombak utama dalam pelaksanaan syari'at Islam. Mahkamah Syar'iyah menjadi hasil akhir dari pada bukti pelaksanaan syari'at Islam.¹⁷

Dalam proses penyelesaian perkara jinayah, adanya kekhawatiran akan adanya permasalahan dalam pelaksanaannya masih belum terbukti. Hal ini lebih disebabkan karena penegakan Syari'at Islam memberikan rasa kepuasan dan keadilan dengan hukum yang sesuai dengan keimanannya, dan keadilan karena dipandang hukuman yang diberikan sepadan dengan kesalahannya. Bahkan penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual dan sosial. Adanya fakta historis bahwa keinginan untuk melaksanakan akan Syari'at Islam yang sekarang berlaku di Aceh, merupakan buah perjuangan yang telah sekian lama diperjuangkan, dan ketika dimungkinkan untuk ditegakkan memberikan suatu rasa kepuasan dan keadilan bagi hukum yang dicita-citakan.

¹⁷ Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), h. 149.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembalipemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif/Doktrinal. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.¹⁹ Ditinjau dari sudut tujuan penelitian, metode yuridis normatif/doktrinal mencakup terhadap penlitian atas azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum.

2. Pendekatan Masalah

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi yang

¹⁸P. Koko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991), h. 2

¹⁹Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 4-5

memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya.

Maksudnya adalah penelitian ini menggunakan hukum yang berlaku di Aceh dan lingkungan Mahkamah Syar'iyah sebagai analisis.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Bahan hukum tersebut adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN tentang *jarimah khamar*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan

²⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2001), h.

bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti, yaitu seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasannya berhubungan dengan data primer.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun untuk menganalisis keseluruhan bahan hukum yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis Deskriptif dan Interpretatif.

- a. Metode deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam

kerangka menyusun teori-teori baru. Berkaitan dengan hal ini bahan hukum Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN dilakukan dengan menggambarkan konsep praktik dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah.

- b. Metode interpretatif analitis, digunakan untuk mengadakan penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan penafsiran terhadap perundang-undangan dan qanun provinsi Aceh. Metode ini akan penulis gunakan untuk mendalami Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN baik secara eksplisit maupun implisit untuk menafsirkan, memposisikan dan membandingkan agar dapat mengungkap dasar pertimbangan hukum yang terdapat di dalamnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan dalam usaha memberikan gambaran singkat mengenai isi dari skripsi tersebut, penulis membagi skripsi ini

ke dalam lima bab, dan tiap babnya terdiri dari sub-sub bab yang tentunya antara satu bab dengan bab yang lainnya mempunyai keterkaitan. Adapun sistematika penulisan secara terperinci sebagai berikut:

- BAB I** : Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Berisi Tinjauan Umum mengenai *khamar*, dimulai dari *khamar* menurut hukum Islam yang berisi pengertian *khamar*, jenis-jenis *khamar*, dasar larangan *khamar*, *‘Uqubat* yang diberikan kepada pelaku *khamar*, serta pandangan Ulama tentang *khamar*. Dan *khamar* menurut Qanun Aceh yang berisi Pengertian *khamar* dan peraturann Qanun Aceh tentang *khamar*.
- BAB III** : Berisi Tinjauan Umum mengenai Pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh, bab ini memuat tentang Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, lembaga-lembaga Pelaksana Syari’at Islam di Provinsi Aceh,

Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Menurut Qanun Provinsi NAD, Peraturan tentang berlakunya qanun bagi non muslim.

BAB IV : Berisi Hasil Penelitian dan pembahasan, bab ini memuat tentang Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah No. 01/JN/2016/MS-TKN dan kesesuaian antara Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMAR

Bab II ini akan menjelaskan tentang *khamar* menurut hukum Islam yang berisi pengertian *khamar*, dasar larangan *khamar*, ‘uqubat bagi pelaku khamar dalam hukum pidana Islam, dan pandangan ulama tentang *khamar*. Dan *Khamar* menurut Qanun Aceh yang berisi pengertian *Khamar* dan peraturan Qanun Aceh tentang *khamar*.

A. Khamar Menurut Hukum Islam

1. Pengertian *Khamar*

Kata *khamar* berasal dari bahasa Arab, yaitu خمر يخمّر. Dalam kamus Al-Munawwir disebutkan bahwa *khamar* artinya menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang biasa dipakai wanita digunakan istilah خمار karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya. Sedang *khamara* berarti memberi ragi. Adapun *Khamar* diartikan arak, segala yang memabukkan.¹

Secara umum *khamar* diartikan dengan “segala sesuatu dari makanan atau minuman dan obat-obatan yang dapat menghilangkan akal dan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 368

memabukkan”. Macam dan jenis *khamar* itu sendiri sangat banyak. Sebelum datangnya Islam, Masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras.²

Secara terminologi, *khamar* adalah:

ان الخمر في لسان الشرع واللغة اسم لكل ما يخمر العقل و يغطيه بخصوص المادة التي يتخذ منها فقد يكون من العنب وقد يكون من غيره

“Bahwa Khamar (minuman keras) menurut pengertian syara’ dan bahasa arab adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya”.

Khamar merupakan sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal, dan menyebabkan manusia keluar dari kesadarannya yang benar.³ Akal adalah unsur terpenting yang terdapat dalam tubuh manusia. Ia adalah daya atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai alat berfikir dan alat untuk mempertimbangkan baik buruknya sesuatu, dan ia adalah salah satu dari dua potensi yang diberikan kepada manusia selain nafs (jiwa). Keduanya akal dan *nafs* adalah potensi ruhaniah yang bersumber dari

²Mardana, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana Nasional*, h. 73

³Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas’akunaka: Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi (Jakarta: Lentera, 1997), h. 526

Allah yang ditempatkan kedalam jasmani manusia. Akal pula yang membedakan manusia dengan hewan. Karena itu, menjaga kesehatan akal menjadi kebutuhan *dharuri* (mutlak) bagi manusia. Tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah haram dan dinamai *khamar*. Sesuatu yang dapat memabukkan apabila diminum sedikit ataupun banyak maka hukumnya haram.⁴

Khamar adalah perasan anggur (dan sejenisnya) yang diproses menjadi minuman keras yang memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamar*.⁵ Perasan anggur dan kurma pada dasarnya boleh diminum selama tidak menjadi *khamar* (belum rusak). Dalam riwayat dikatakan:

عن عائشة رض قالت : كنا ننبد لرسول الله ص في سقاء فنأخذ قبضة من تمر و قبضة من زبيب فنطرحهما, ثم نصب عليه الماء فننبد غدوة فيشره عشية و ننبد عشية فيشره غدوة . ابن ماجه

“Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “*Kami pernah membuatkan minuman Rasulullah SAW dalam suatu wadah, kami mengambil segenggam kurma dan segenggam anggur lalu kami tuangkan air. Kami membuatnya pada pagi hari kemudian diminum pada sore hari dan (jika) kami membuatnya pada sore hari lalu diminum pada pagi hari.* (HR. Ibnu Majah)”.

⁴TM. Hasbi Ash-Shiddieq, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan antar Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 211

⁵A. Musthafa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus* (Surabaya: Khalista, 2005), h. 497

Pada masa Nabi, sebagian orang sudah terbiasa meminum minuman *khamar*, kebiasaan ini belum hilang meskipun mereka sudah memeluk Islam. Mereka masih terus meminum minuman *khamar* hingga Nabi Muhammad Hijrah dari Mekkah ke Madinah. Umat Islam bertanya-tanya tentang minuman *khamar* dan tentang berjudi demi melihat kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kedua perbuatan itu. Oleh karena itu Allah SWT menurunkan ayat:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٢٩

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q. S. Al-Baqarah: 219).

Maksudnya ialah bahwa melakukan kedua perbuatan itu mengandung dosa besar, karena di dalamnya terdapat kemudharatan-kemudharatan serta kerusakan-kerusakan material dan keagamaan. Kedua hal itu memang memiliki manfaat dari segi material, yaitu keuntungan bagi penjual *khamar* dan kemungkinan memperoleh harta benda dengan mudah bagi si penjudi. Akan

tetapi dosanya jauh lebih banyak daripada manfaat-manfaatnya, sebab itulah kedua hal tersebut diharamkan.⁶

Islam melarang *khamar* karena efek negatifnya yang multi-aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, psikis, dan lain-lain. Secara sosial, budaya minum-minuman keras dapat melahirkan perilaku-prilaku yang kasar anti sosial; secara budaya, dalam masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang tidak kreatif, produktif, inovatif, dan sebagainya, sebab budaya mabuk menyebabkan orang malas, boros, dan lainnya. Secara Ekonomi, budaya minum-minuman keras menggerogoti pendapatan dan pengeluaran, sebab anggaran belanja yang seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat telah terkuras untuk membeli *khamar*, secara hukum, jika budaya *khamar* subur dimasyarakat, maka berbagai kasus kriminalitas kelas berat dapat terjadi pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, penganiayaan, dan sebagainya, yang ujung-ujungnya menjadi urusan aparat penegak hukum. Dan secara psikis, banyak pemabuk yang ketagihan akan prustasi, depresi dan gejala

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, juz 2), h. 375

mental lainnya akibat kebiasaan buruknya bertentangan dengan norma-norma sosial.⁷

2. Dasar Larangan Khamar

Islam dengan tegas dan jelas melarang serta mengharamkan *khamar* bagi seluruh kaum muslimin. Karena salah satu *maqashid syari'ah* adalah menjaga akal, maka syari'at Islam sangat tegas melarangnya. Larangan *khamar* terdapat secara *sharih* dalam Al-qur'an dan hadits.

1. Ayat-ayat Al-qur'an

❖ Surat An-nisa' ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... ٤٣

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,...” (Q. S An-Nisa': 43).

Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa *Asbab An-nuzul* ayat ini ialah kasus seorang muslim yang mengerjakan shalat padahal ia sedang dalam keadaan mabuk.⁸

⁷Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2006), h. 68-70

⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaa Panji Mas, 1999), h. 78

❖ Surat Al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q. S Al-Maidah: 90).

Dari larangan di atas, nyatalah bahwa Allah SWT mengkategorikan judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib sama dengan khamar, semua hal ini dihukumkan sebagai berikut:

- a. Keji dan menjijikkan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai pikiran waras;
- b. Perbuatan, godaan dan tipu daya syaitan;
- c. Lantaran perbuatan itu merupakan perbuatan syaitan, maka haruslah dihindari. Dengan menjauhan diri dari perbuatan itu, berarti yang bersangkutan telah bersiap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan.
- d. Tujuan syaitan untuk menggoda manusia agar meminum *khamar* adalah untuk merangsang timbulnya permusuhan dan persengketaan. Permusuhan dan persengketaan ini merupakan dua bentuk kerusakan duniawi.

- e. Tujuan lain dari godaan itu ialah untuk menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan shalat. Hal ini jelas merupakan kerusakan keagamaan.⁹

Atas dasar itulah manusia diwajibkan menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Ayat diatas merupakan ayat terakhir yang menghukumi minum khamar dengan hukum haram mutlak (*qath'î*).

2. Hadits-hadits Nabi

Adapun Hadits yang menjadi dasar larangan *khamar* adalah:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram.” (HR. Muslim).

لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما

“Seorang yang meminum khamar dari golonganku, tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh hari” (HR. An-Nasai) .

Rasulullah juga bersabda :

لا يدخل الجنة مدّ من خمر

“Tak akan bisa masuk surga orang yang suka meminum khamar.” (HR. Ibnu Majjah).

⁹Sayyid Sabiq, *Ibid*, h. 374-375.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikitpun juga haram". (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Daruquthni, dan dia menshahihkannya).¹⁰

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَنْبِذُ النَّبِيذَ فَتَشْرِبُهُ عَلَى غَدَائِنَا وَ عَشَائِنَا، فَقَالَ: اِشْرَبُوا فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكْسِرُهُ بِالمَاءِ، فَقَالَ: حَرَامٌ قَلِيلٌ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Nabi SAW didatangi suatu kaum, lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami (biasa) membuat minuman keras, lalu kami meminumnya di pagi dan sore hari. Lalu Nabi SAW bersabda, "Minumlah, tetapi setiap minuman yang memabukkan itu haram". Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mencampurnya dengan air". Nabi SAW menjawab, "Haram (walaupun) sedikit dari minuman yang (dalam kadar) banyaknya memabukkan". [HR. Daruquthni]

عن اناس قال: لعن رسول الله ص في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيتها و باءعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. اترمذى و ابن ماجه

Dari Anas ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat tentang khamar sepuluh golongan : 1. yang memerasnya, 2. pemiliknya (produsennya), 3. yang meminumnya, 4. yang membawanya (pengedar), 5. yang minta diantarnya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, 10. yang minta dibelikannya". [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah].¹¹

¹⁰Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh alMarram Fi Adillati al-Ahkam* (Bairut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah), h. 265

¹¹Lihat, Nailul Authar juz 5, h. 174

3. *‘Uqubat* bagi pelaku *Khamar* dalam Hukum Pidana Islam

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman dalam hukum pidana Islam, hukum ini mengenal tiga jenis hukuman, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas*, dan *jarimah ta’zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd* adalah hukuman yang ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam yaitu, zina, *qazhaf* (tuduhan palsu), *syurbul khamar* (meminum minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari agama Islam), dan *Al-Baghyu* (pemberontakan).

Orang yang minum *khamar* atau peminum-minuman yang memabukkan wajib dijatuhi *hadd* sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda:

عن قبيضة بن دؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه

“Dari Qubaidhoh bin Du’aib bahwa Rasulullah berkata: “barang siapa meminum *khamar*, maka jilidlah”.¹²

Telah ditetapkan bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamar*, hadis tersebut mencakup baik sedikit (minumnya) ataupun banyak. ‘*Ijma’*’ sahabat telah sepakat, bahwa peminum *khamar* harus dijatuhi *hadd* (bagi) peminum

¹²Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, h. 165

khamar, dan sepakat bahwa *hadd* bagi peminum *khamar* tidak boleh kurang dari 40 kali *jilid* (cambuk).

Ulama yang meneliti hadis-hadis Nabi SAW, tentang jilid peminum *khamar*, akan menjumpai bahwa peminum *khamar* dijilid 40 kali. Dan boleh ditambah 40 kali *jilid*. Dan pendapat lain mengatakan boleh ditambah lebih dari 40 kali jilid.

4. Pandangan Para Ulama tentang Khamar

Para ahli *fiqh* berbeda dalam mendefisikan *khamar*. Menurut Imam Hanafi, *khamar* khusus kepada minuman yang terbuat dari benda-benda yang disebutkan dalam hadits nabi seperti anggur, kurma, gandum, madu dan beberapa yang lain. Menurutnya *khamar* dan memabukkan itu sesuatu yang berbeda. Jadi, benda lain yang diminum, walaupun memabukkan, menurut Imam Hanafi tidak termasuk *khamar* dan tidak haram. Sebaliknya, tiga imam lain Imam Malik, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram tanpa terkecuali. Pendapat yang mayoritas diikuti dunia Islam adalah pendapat yang kedua ini.¹³

¹³ Musthafa K.S, *Alkohol Dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan* (Bandung: PT. Al_Ma'arif) h. 21

Perbedaan dalam mendefenisikan *khamar* adalah perbedaan dalam melihat *'illat* hukumnya. *'Illat* adalah unsur utama yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum sesuatu. Menurut Imam Hanafi, *'illat*nya adalah jenis bahan bakunya, yaitu anggur. Sedangkan bagi Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali, *'illat* hukumnya adalah sifat memabukkan dari suatu minuman, karena itu jika *'illat* ini yang dipegang, maka semua jenis minuman yang memabukkan termasuk *khamar* dan haram hukumnya. Pendapat terakhirlah yang paling banyak dianut dalam dunia Islam, yakni pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Hambali. Sebab di zaman modern ini, jenis-jenis minuman yang memabukkan berbagai macam model dan jenisnya. Ia juga dapat diolah dari berbagai macam bahan baku selain yang disebutkan Nabi. Bahkan dengan kemajuan teknologi, benda yang memabukkan bukan lagi berupa minuman, tetapi bisa dalam bentuk dihisap, disuntik, dimakan, dan sebagainya yang membuat pelakunya lebih mabuk dari pada mengkonsumsi benda memabukkan dalam bentuk minuman. Bentuk terakhir saat ini populer dengan istilah Narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang). Yang termasuk obat-obatan terlarang adalah heroin, kokain, sabu, putau dan sebagainya, yang pada umumnya benda-benda tersebut digunakan untuk kebutuhan farmasi dan kebutuhan medis.

Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dan Muhammad Rasyid Rida bahwa meminum minuman yang mengandung unsur alkohol, walaupun kadarnya sedikit dan tidak memabukkan, sebaiknya dihindarkan untuk tidak diminum. Mereka berpegang pada kaidah "*sadd az-zari'ah*" (tindakan pencegahan), karena meminum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, tetapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan bagi peminumnya, sedangkan meminumnya dalam jumlah yang lebih sudah pasti memabukkan. Karenanya, hal ini lebih banyak membawa mudarat dari pada manfaat.¹⁴

Dalam hal pemanfaatan alkohol untuk keperluan sandang dan papan (seperti pembersih alat-alat tertentu di rumah tangga, rumah sakit, kegiatan industri, dan laboratorium), sebagian Ulama mengatakan hukumnya najis dan sebagian lainnya mengatakan tidak najis. Imam Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat mengatakan bahwa alkohol adalah najis, dengan mengkiaskannya kepada *khamar* karena kesamaan *illat* atau sebabnya, yaitu sama-sama memabukkan.

¹⁴Ahmad As-Sarbashi, *Ibid*, h. 528

Ulama yang menghukumkan *khamar* sebagai najis beralasan pada surah Al- Ma'idah (5) ayat 90. Dalam ayat itu disebutkan bahwa *khamar* termasuk *rijsun* yang diartikan najis, dan najis adalah kotor berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-A 'raf (7) ayat 157, karenanya harus dijauhi. Atas dasar ini mereka menetapkan bahwa alkohol dan semua yang memabukkan adalah najis, sebagaimana *khamar*. Sebagian ulama Mazhab Hanafi bahkan menegaskan bila alkohol mengenai pakaian, maka pakaian itu tidak boleh dipakai untuk shalat. Jika tetap dipakai, maka shalatnya tidak sah atau batal.¹⁵

Pendapat di atas beralasan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Sa'labah al-Khasyani. Dalam hadits tersebut ia bertanya kepada Rasulullah SAW: "*Ya Rasulullah, kami berada di kampung orang-orang ahlul kitab, apakah kami boleh makan memakai alat-alat (misalnya piring yang telah) mereka (pakai)?*" Rasulullah SAW menjawab: "*Jika kamu bisa mendapatkan yang lain, selain dari alat yang mereka pakai itu, maka jangan kamu makan di situ. Tetapi, jika tidak ada yang lain lagi, maka basuhlah (terlebih dahulu), baru kamu makan di situ*". (HR. ad-Daruqutni).

¹⁵TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ibid*, h. 445

Dalam riwayat lain dikatakan pula: "*Kami berkunjung kepada orang-orang ahlulkitab, mereka memasak daging babi dalam periuk mereka dan minum khamar dengan alat-alat (gelas) mereka. Rasulullah SAW menjawab "Jika kamu bisa mendapatkan yang lain, pakailah yang lain, tapi jika tidak ada yang lain, maka basuhlah dengan air, lalu makan dan minumlah di situ" (HR. Abu Dawud).*

Sebaliknya Imam *Rabi'ah ar-Ra'yi* (guru Imam Malik), al-Lais bin Sa'ad, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H/878 M; ulama Mazhab Syafi'i), sebagian ulama Baghdad kontemporer, dan Mazhab az-Zahiri mengatakan bahwa *khamar* adalah suci. Pendapat ini beralasan pada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat menumpahkan *khamar* di jalan-jalan Madinah ketika turun ayat yang menegaskan keharamannya. Seandainya *khamar* itu najis, tentu sahabat tidak melakukannya karena Nabi SAW akan melarangnya, akan tetapi ternyata Nabi SAW tidak melarangnya. Mereka menegaskan, kata *rijsun* dalam surah al-Ma'idah (5) ayat 90, kalau diartikan najis, maka yang dimaksud adalah najis *hukmy* (najis secara hukum), bukan najis *'aini* (najis secara materi). Menurut mereka, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah (9) ayat 28, yang artinya: "*Sesungguhnya*

orang-orang musyrik itu adalah najis...". Di samping itu kata-kata *rijsun* tersebut juga menjadi sifat bagi *al-maisyir* (judi), *al-ansab* (berkurban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan panah). Namun, tak seorang ulama pun yang menyatakan benda-benda tersebut adalah najis 'aini. Di antara ulama yang berpendirian bahwa *khamar* itu suci adalah Muhammad bin Ali asy-Syaukani dan Muhammad Rasyid Rida dalam kitab Tafsir *Al-Manar*, menyatakan ketidaknajisan alkohol dan *khamar* serta berbagai parfum yang mengandung alkohol atas dasar tidak adanya dalil sarih (tegas) tentang kenajisannya. Majelis Muzakarah al-Azhar Panji Masyarakat berpendapat sama bahwa alkohol di dalam minyak wangi hukumnya tidak haram, sebaliknya memakai minyak wangi malah disunahkan.¹⁶

Atiah Saqr (ahli fikih Mesir) dalam bukunya *Al-Islam Wa Masyakil Al-Hajah (Islam dan Masalah Kebutuhan)* mengemukakan bahwa mengingat alkohol kini sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan (seperti medis, obat-obatan, parfum dan sebagainya), maka ia cenderung mengambil pendapat yang mengatakan kesuciannya, karena pendapat ini sesuai dengan prinsip

¹⁶Azumardi Azra, *Islam dan Masalah-masalah kemasyarakatan* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 426

alyusr (kemudahan) dan *adam al-haraj* (menghindarkan kesulitan) dalam hukum Islam.¹⁷

Dalam menetapkan hukum penggunaan alkohol untuk pengobatan, ulama fikih tetap berpedoman pada hukum *khamar*. Imam mazhab yang empat pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa memakai *khamar* dan semua benda-benda yang memabukkan untuk pengobatan hukumnya adalah haram. Pendapat ini beralasan pada hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat (untuk) kamu dari sesuatu yang diharamkan memakannya*" (HR. al-Bukhari).

Tariq bin Suwaid meriwayatkan pula bahwa "*dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khamar. Rasulullah SAW melarang atau membenci pembuatan khamar itu. Ibnu Suwaid berkata: "Aku membuatnya hanya semata-mata untuk obat". Rasulullah menjawab: "Sesungguhnya (khamar) itu bukannya obat, tetapi malah penyakit*" (HR. Abu Dawud). Hadis lain dari Abu Darda yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan (sekaligus) penawar (obat)-nya, maka berobatlah kamu sekalian, dan janganlah kamu berobat dengan yang haram*" (HR. Abu

¹⁷Azyumardi Azra (penyunting), *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 426

Dawud). Akan tetapi, ulama yang datang belakangan memberikan kelonggaran dengan beberapa persyaratan tertentu. Sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan (termasuk khamar, nabiz, dan alkohol), dengan syarat diketahui secara yakin bahwa pada benda tersebut benar-benar terdapat obat (sesuatu yang dapat menyembuhkan), dan tidak ada obat lain selain itu.

Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haram hukumnya berobat jika hanya dengan *khamar* atau alkohol murni, tanpa dicampur dengan bahan lain, di samping memang tidak ada bahan lain selain bahan campuran alkohol tersebut. Disyaratkan pula bahwa kebutuhan berobat dengan campuran alkohol itu harus berdasarkan petunjuk atau informasi dari dokter muslim yang ahli di bidang itu. Demikian pula penggunaannya hanya sekedar kebutuhan saja dan tidak sampai memabukkan.

Pada umumnya, ulama fikih membolehkan menggunakan alkohol untuk berobat sejauh adanya situasi atau kondisi keterpaksaan atau darurat. Mereka beralasan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi SAW, dan kaidah fikih. Dalil-dalil dari Al-Qur'an yang dikemukakan antara lain surah al- Baqarah(2) ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ... ١٨٥

"Allah menghendaki bagimu suatu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

Surat al-Hajj (22) ayat 78:

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ٧٨

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".

Kebolehan menggunakan alkohol itu juga dikiaskan kepada kebolehan memakan beberapa jenis makanan yang diharamkan, apabila keadaan memaksa tanpa sengaja untuk berbuat dosa (QS.2:173, 5:3, 6:145, dan 16:115). Dalil-dalil berdasarkan hadis yang digunakan antara lain, hadis dari Ibnu Abbas yang menjelaskan: "Sesungguhnya Allah mensyariatkan agama, maka dijadikan-Nya agama itu mudah, lapang dan luas, dan Dia tidak menjadikannya suatu kesempitan" (HR. at-Tabrani). Sedangkan kaidah fikih yang menopangnya antara lain, *"Kesulitan itu dapat membawa kepada kemudahan dan keterpaksaan dapat membolehkan sesuatu yang diharamkan"*.¹⁸

¹⁸Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1992, hlm. 2930.

B. Khamar Menurut Qanun Aceh

1. Pengertian Khamar

Berdasarkan Ketentuan Umum Bab 1 dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *khamar* merupakan minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Memproduksi khamar adalah setiap kegiatan atau proses tentang menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi *khamar*.

Dari definisi ini, maka unsur-unsur pidana yang terdapat dalam *khamar* ini, selain unsur-unsur umum sebagaimana yang disebutkan (ada nash larangan, melakukan perbuatan yang dilarang/ melawan hukum, dan pelakunya *mukallaf*), maka ada dua unsur tambahan yang khusus untuk pidana *khamar*, yaitu:

- a) Perbuatan meminum-minuman yang memabukkan dan berbahaya bagi kesehatan, kesadaran, dan daya pikir.
- b) Ada I'tikad jahat.

Unsur utama dari perbuatan pidana *khamar* itu sendiri adalah perbuatan minum, dan sifat zat dari benda yang diminum adalah memabukkan. Dalam hal

ini, bukan berarti bahwa jika minumannya tidak sampai memabukkan maka ia menjadi halal, sebab hadist Nabi dengan jelas menyatakan keharamannya, baik diminum banyak ataupun sedikit. Yang dimaksud dengan i'tikad jahat disini adalah bahwa pelaku sudah mengetahui bahwa *khamar* dapat menghilangkan akal sehat dan kemungkinan besar dalam kondisi mabuk ia dapat melakukan apa saja yang membahayakan dirinya dan orang lain, tetapi ia tetap mengkonsumsinya. Hal ini menandakan bahwa ia acuh terhadap kepentingan orang lain.

Dalam definisi ini *khamar* telah dikhususkan kepada minuman yang memabukkan, artinya benda-benda lain yang sifatnya memabukkan tetapi tidak berbentuk minuman seperti narkoba dan obat-obatan terlarang, tidak termasuk dalam pengertian *khamar* dalam qanun ini.

2. Peraturan Qanun Aceh tentang Khamar

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, masalah *khamar* diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun ketentuan-ketentuan materiil tentang *khamar* tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali;
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan;
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB III

PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH

Bab ini akan menjelaskan tentang Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan syari'at islam di Aceh, lembaga-lembaga pelaksana syari'at Islam di Provinsi Aceh, penerapan sanksi pidana cambuk, dan ditutup dengan perbincangan mengenai peraturan tentang berlakunya Qanun Aceh bagi non muslim.

A. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

Aceh mendapat keistimewaan dan otonomi khusus untuk mengatur daerahnya sendiri dan diperbolehkan untuk melaksanakan syari'at Islam namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai keistimewaan dan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh ialah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang ini dibuat dalam rangka menindaklanjuti ketentuan mengenai Keistimewaan Aceh sehingga pada saat itu dipandang perlu untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah.

Dalam pasal 3 Bab II mengenai kewenangan, disebutkan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki. Maksudnya adalah bahwa peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimaksud untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaannya berlaku di seluruh Kabupaten/Kota. Adapun penyelenggaraan keistimewaan tersebut meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.¹

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam kemasyarakatan yakni tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan membuat kebijakan daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan

¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Bab III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Pasal 3

kepada Allah SWT. Bukan hanya itu, Pemerintah Daerah pun harus menjamin pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah yang diperintah oleh agamanya dan keyakinannya masing-masing.

- b. Penyelenggaraan kehidupan adat. Dalam penyelenggaraan kehidupan adat ini, Pemerintahan Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam.²
- c. Penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional, yang maksudnya adalah bahwa kurikulum dalam setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sama dengan kurikulum pada sistem pendidikan nasional serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pada pasal ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk sebuah badan

² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Bab III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Bagian Ketiga Pasal 6-7

yang anggotanya terdiri atas para Ulama, yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami. Pertimbangan badan tersebut dapat berbentuk fatwa atau nasihat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang dapat digunakan dalam pembahasan kebijakan daerah.³

Kehidupan demikian menghendaki adanya implemementasi formal penegakan syari'at Islam. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.⁴

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2001 dan bertempat di Jakarta. Undang-

³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Bab III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Bagian kelima Pasal 9.

⁴ Sufiana, H. Yusrizal, *Mahkamah Syar'iy & Pengadilan Agama dalam sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 107

Undang ini sebenarnya peraturan yang mengatur kewenangan pemeritah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan Pemerintahan Daerah. Adapun hal-hal yang mendasari undang-undang ini ialah pemberian kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Termasuk sumber-sumber ekonomi yang terdapat di daerah tersebut, menggali serta memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat dari padanya. Kemudian Pemerintah Daerah juga dapat mengaplikasikan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Kekhususan pada Provinsi Aceh ini menjadi peluang atau kesempatan yang berharga bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, serta pembentukan dana pemberian nama dalam pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang telah lama hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Aceh yang disebut Qanun. Maka dari Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 inilah

⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

muncunya Qanun Aceh yang sebagian aturan-aturannya berisikan syari'at Islam.

Adapun pengertian Qanun di dalam Undang-Undang ini Pasal 1 butir 8, bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan undang-undang ini dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain, yakni dengan mengikuti asas "*lex specialis derogat legi generalis*" dan Mahkamah Agung juga berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun Aceh tersebut.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Sepanjang perjalanan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan atau keadilan di dalam kehidupan. Dari beberapa undang-undang yang telah diundangkan dan disahkan dipandang belum dapat sepenuhnya mewujudkan mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu

dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Maka dari pada itu, hal yang demikian menimbulkan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh juga memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekedar hak Pemerintahan Daerah dan rakyat Aceh, akan tetapi merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.⁶

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ini terdapat perbedaan antara Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh hanya terdapat dalam Qanun Aceh saja. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 ini Qanun Aceh diartikan sebagai Peraturan Perundang-undangan sejenis

⁶ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Sedangkan Qanun Kabupaten/Kota ialah peraturan peundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota diperuntukkan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota saja yang berada di Provinsi Aceh.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh berfungsi mengatur pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota. Dapat dinyatakan di sini, bahwa qanun sebagai peraturan daerah di Aceh hanya mencakup bidang-bidang urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam. Tentunya di luar urusan bidang syari'at Islam pengaturannya lebih lanjut dilaksanakan dengan peraturan daerah. Pembentukan qanun merupakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Qanun kabupaten/kota (DPRK) bersama dengan bupati atau walikota.

Selain itu yang menarik dalam Undang-Undang ini yaitu bahwa setiap pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yakni dengan syarat tetap mengikuti standar nasional pendidikan di Indonesia.⁷ Hal ini merupakan bentuk wujud dari salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh yaitu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam yang hal tersebut termaktub dalam pasal 17 ayat (2).

Berkenaan dengan syari'at Islam, di dalam Bab VXII tentang syari'at Islam dan pelaksanaannya dibahas mengenai aturan-aturan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Disebutkan bahwa syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang aqidah, syari'ah dan akhlak. Yang meliputi: ibadah, *ahwal al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam.⁸

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab V Pasal 18.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1) dan (2).

Lebih lanjut Al-Yasa Abubakar menyatakan sangat tepat jika Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2001 disebut sebagai Undang-Undang Otonomi Khusus karena banyaknya pengecualian yang diberikan kepada Aceh. Tentu saja dari satu sisi ini merupakan penghargaan yang tinggi terhadap keistimewaan Aceh.

Dari keseluruhan syari'at Islam yang diatur di Aceh yang wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam tersebut ialah tiap-tiap jiwa yang memeluk agama Islam yang berada di Aceh. Jadi setiap Qanun yang berlaku di Aceh mengikat setiap muslim yang berada di wilayah Aceh.⁹ Adapun bagi non muslim yang bertempat tinggal atau berada di Aceh, maka wajib baginya untuk menghormati pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Selama tahun 2002, Pemerintah Provinsi Aceh telah mengesahkan 17 (tujuh belas) qanun.¹⁰ Yakni sebagai bentuk penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satunya ialah Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam. Qanun tersebut

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Pasal 126 ayat (1).

¹⁰ Al-Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), h. 19.

menguatkan berlakunya syari'at Islam secara hukum legal di Provinsi Aceh yakni bukan sebagai hukum adat yang berlaku di Aceh. Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ialah bahwa Pemerintahan Aceh mengharapkan mampu melaksanakan atau menerapkan syari'at Islam (tuntutan ajaran islam) dalam semua aspek kehidupan di Provinsi Aceh yang diberlakukan kepada semua muslim yang berada di Aceh, baik aspek kehidupan tersebut dalam bidang aqidah, ibadah, maupun syi'ar Islam.¹¹

Pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang aqidah yakni aqidah Islamiyah menurut ajaran *Ahlussunnah Wa al-Jama'ah*. Adapun dalam bidang ibadah yang diatur dalam qanun ini ialah mencakup shalat dan puasa Ramadhan. Diatur pula pelaksanaan syari'at Islam dalam syi'ar Islam yakni maksudnya ialah segala kegiatan yang terkandung di dalamnya nilai-nilai ibadah yang bertujuan untuk menyemarakkan serta mengagungkan pelaksanaan syari'at Islam. Diwajibkan atas muslim menutup aurat dengan memakai pakaian *syar'i*.¹²

Tujuan dari pengaturan dari aspek ibadah seperti shalat jum'at, shalat tarawih, serta puasa ramadhan ialah bahwa Pemerintah Aceh bermaksud untuk

¹¹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam Pasal 1

¹² Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam Bab VII Ketentuan Pidana Pasal 23.

mendorong serta menggalakkan orang Islam untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan ibadahnya sebagai wujud pengabdian seorang hamba kepada Khaliknya. Karena sesungguhnya tanggung jawab pemerintah sebagai *ulil amri*, bukan saja mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah, akan tetapi yang bersifat ibadah, baik individu maupun jama'ah pemerintah juga perlu mengingatkan masyarakatnya untuk melaksanakan segala ibadah tersebut, agar menjadi masyarakat yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi-Nya, dan taat kepada *ulil amri*.¹³

B. Lembaga-lembaga Pelaksana Syari'at Islam di Provinsi Aceh

1. Dinas Syari'at Islam

Dinas Syari'at Islam ini merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana syari'at Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Aceh yang kedudukannya di bawah Gubernur. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

¹³ Penjelasan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dalam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syi'ar Islam.

Dinas Syari'at Islam memiliki fungsi:

- a) Sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan, qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syari'at Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
- b) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan syari'at Islam.
- c) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakkan syi'ar Islam.
- d) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat.
- e) Pelaksanaan tugas yang berhubungan bimbingan dan penyuluhan syari'at Islam.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Syari'at Islam memiliki kewenangan:

- a) Merencanakan program penelitian dan pengembangan unsur-unsur syari'at Islam.
- b) Melestarikan nilai-nilai Islam.
- c) Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syari'at Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, *mu'amalah*, akhlak, pendidikan, dan dakwah islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, baitul mal, kemasyarakatan, syari'at Islam, pembelaan Islam, *qadha* (peradilan), *jinayat* (hukum pidana), *munakahat* (hukum perkawinan), dan *mawaris* (hukum waris).
- d) Mengawasi terhadap pelaksanaan syari'at Islam.
- e) Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

2. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah terdiri dari dua kata, yaitu *wilayat* dan *hisbah*.

Secara harfiah *wilayat* berarti kekuasaan atau kewenangan, sedangkan *al-hisbah* berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.¹⁴

¹⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.

Menurut Al-Mawardi, *Wilayatul Hisbah* adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika perkara ini mulai dikerjakan orang.

Wilayatul Hisbah (WH) adalah badan yang melakukan pengawasan, pemberi ingat dan pencegahan atas pelanggaran syari'at Islam. Mengenai struktur, kewenangan ataupun mekanisme kerja badan ini akan ditetapkan dengan peraturan lain yang diatur dalam qanun. Dalam keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara kerja Wilayatul Hisbah dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa susunan organisasi Wilayatul Hisbah, terdiri atas:

- a) Wilayatul Hisbah Tingkat Provinsi;
- b) Wilayatul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota;
- c) Wilayatul Hisbah Tingkat Kecamatan, dan
- d) Wilayatul Hisbah Tingkat Kemukiman/Pedesaan.

3. Lembaga Kepolisian

Lembaga kepolisian disini adalah lembaga kepolisian yang berada di Aceh. Lembaga kepolisian mempunyai peran pada proses peradilan dalam rangka melaksanakan syari'at Islam di Aceh. Lembaga kepolisian di Aceh

haruslah mengerti dan memahami karakter kebiasaan dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Aceh. Kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadinya tindakan pelanggaran terhadap qanun-qanun yang ada di Aceh.

Dalam pasal 207 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh kepolisian Aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam dan budaya, serta adat istiadat dan kebijakan Gubernur Aceh.

4. Lembaga Kejaksaan

Lembaga kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang berada di Aceh. Kejaksaan bertugas melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan Syari'at Islam. Wewenang jaksa di Aceh sama halnya dengan wewenang jaksa yang di atur dalam Undang-Undang , yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara pidana terhadap pelanggar yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam

qanun dan melakukan eksekusi terhadap keputusan hakim setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan qanun ini serta melaksanakan syari'at Islam dalam wilayah provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam melaksanakan kewengannya, Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.¹⁵ Mahkamah syar'iyah sebagaimana yang dimaksud tersebut merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh disebutkan:

- (1) Peradilan Sari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

¹⁵Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

- (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) didasarkan atas syari'at islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun Provinsi NAD.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Pada pasal tersebut jelas ada tambahan pada “keistimewaan” Aceh. Yakni, adanya peradilan khusus untuk melaksanakan syari'at Islam yaitu Mahkamah Syar'iah sebagai lembaga peradilan tingkat I dan Mahkamah Syar'iah Provinsi sebagai lembaga peradilan tingkat banding. Lembaga inilah yang berwenang melaksanakan syari'at Islam untuk umat Islam di Aceh baik tingkat I maupun tingkat banding. Sedang untuk kasasi tetap dilakukan di Mahkamah Agung.

Tentang peradilan syari'at Islam yang diatur dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa perkara-perkara di bidang perdata yang meliputi hukum kekeluargaan, hukum perikatan dan hukum harta benda serta perkara-perkara di bidang pidana yang meliputi *Qishas-Diat*, *Hudud* dan *Ta'zir* sebagai kewenangan Mahkamah Syar'iah.

Mahkamah Syar'iyah ini terdiri dari:

1. Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
2. Mahkamah Syar'iyah (Kabupaten/Kota) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di masing-masing Kabupaten/Kota.

C. Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Menurut Qanun Provinsi Aceh

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, keistimewaan yang selalu disebut-sebut sebagai ciri utama dan telah menjadi identitas Aceh sejak tahun 1959 itu diharapkan menjadi lebih nyata dan betul-betul dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Ketika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 disahkan, oleh rakyat Aceh disambut dengan “Pengadilan Rakyat”, artinya rakyat yang menjatuhkan hukuman badan kepada para penjudi, peminum minuman keras dan pelaku perbuatan mesum.¹⁶ Penjatuhan hukuman ini digelar di hampir semua Kabupaten, sehingga ada sekitar 40 kasus dalam waktu empat bulan. Pengadilan rakyat yang tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang

¹⁶Menurut KBBI mesum adalah kotor, cemar. Menurut Qanun mesum diartikan sebagai khalwat, yaitu perbuatan berdua-duaan antara lawan jenis di tempat sunyi.

disebut dengan pengadilan liar. “Pengadilan liar” ini baru berhenti setelah para ulama turun memberikan penjelasan bahwa di dalam syari’at Islam, hukuman hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang, dan hanya dapat dilaksanakan oleh petugas yang resmi yang diberi wewenang untuk itu. Rakyat tidak berhak melakukan pengadilan dan tidak berhak menjatuhkan hukuman.

Sejak dihentikannya pengadilan rakyat ini, di berbagai kesempatan, sering terlontar pertanyaan dan tuntutan dari masyarakat kepada para ulama, kapan Mahkamah Syar’iyah menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan. Hukuman yang diminta pada umumnya adalah hukuman cambuk. Dipihak lain, kadang-kadang muncul pernyataan bahwa hukuman cambuk adalah kejam, tidak manusiawi bahkan bertentangan dengan HAM. Pernyataan ini harus disikapi dengan hati-hati. Pada dasarnya semua hukuman adalah siksaan untuk memberikan penderitaan. Penderitaan atau siksaan itu dianggap boleh dan sah dijatuhkan apabila diputuskan oleh pengadilan yang sah dan berwenang untuk itu, dan dengan cara-cara yang sah pula, sehingga keputusan tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena itu hukuman penjara atau hukuman cambuk bukanlah pelanggaran HAM sekiranya dijatuhkan oleh

pengadilan. Sebaliknya memenjarakan atau mencambuk orang tanpa ada putusan dari pengadilan yang sah dianggap sebagai pelanggaran HAM. Selanjutnya kita juga bisa mengajukan pertanyaan, mana yang lebih kejam menyiksa orang dengan hukuman penjara sehingga ia terpisah dengan keluarganya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dibanding dengan hukuman cambuk yang bisa dikatakan tidak sempat memisahkan si terhukum dari keluarganya.

Pendapat para Ulama, cendekia dan Pemerintah Aceh tentang hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan di Aceh terasa lebih manusiawi apabila dibandingkan dengan hukuman cambuk yang dijatuhkan di Negara lain. Hukuman cambuk di Aceh akan dihentikan sekiranya si terhukum luka (mengeluarkan darah) karena cambukan. Terhukum dibiarkan dalam keadaan bebas, tidak diikat dan tidak diberi penyangga. Dengan demikian sekiranya terhukum tidak sanggup lagi menerima cambukan, maka dokter pengawas akan mudah mengetahuinya dan pencambukan akan dihentikan. Terhukum diberi pakaian menutup aurat, sehingga cambukan tidak langsung mengenai kulit.

Menurut Al-Yasa Abubakar, hukuman cambuk ini disamping hukum duniawi, juga merupakan bagian dari ajaran Agama. Dengan demikian

hukuman cambuk merupakan bagian dari pernyataan taubat, yang diharapkan dapat mengampuni dosa di akhirat kelak. Mungkin terhukum merasa malu dan itu adalah wajar, tetapi tidak perlu secara berlebih-lebihan, karena kegiatan ini adalah sebagian dari amal, sebagai tanda dan janji kepada Allah untuk tidak mengulangi kesalahan di masa yang akan datang. Terhukum dan keluarga tidak perlu malu, tetapi sebaliknya merasa puas dan bangga, bahwa mereka termasuk dalam kelompok yang telah bertaubat, yang dapat merenungi dan menyadari kesalahan, termasuk *assabiquna awwalun* (kelompok utama, para pelopor) dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dan dalam bertaubat kepada Allah SWT. Inilah salah satu sebab kenapa halaman Masjid yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan, agar kesyahduan dan kedekatan dengan Allah tetap terjaga dan disadari. Hukuman ini dilaksanakan ditempat terbuka yang dapat dikunjungi masyarakat luas karena Al-qur'an meminta untuk melaksanakan seperti itu.¹⁷

Secara ringkas mengenai pelaksanaan hukuman bagi terdakwa pelaku pelanggaran Qanun di bidang Syari'at Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman kurungan (penjara) dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam KUHAP;

¹⁷ Al-Yasa Abubakar, *Sekilas Syari'at Islam Di Aceh*, (banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006), h. 25-28

- 2) Hukuman denda dilaksanakan sesuai dengan aturan di dalam KUHAP, uang denda disetor ke Badan Baitul Mal (rekening khusus pemerintah Kabupaten).
- 3) Hukuman Cambuk
 - a) Pencambuk adalah petugas yang sudah dilatih, yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum, biasanya adalah aparat Wilayatul Hisbah (Polisi Syari'at) yang sudah terlatih untuk itu;
 - b) *'Uqubat* cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk;
 - c) Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter antara 0,75 s.d 1,00 cm, panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah;
 - d) Jarak pencambuk dengan terhukum minimal 70 cm sampai dengan 1 meter;
 - e) Jarak pencambuk dengan orang-orang yang menyaksikan paling dekat 10 meter.
 - f) Pencambukan dilakukan diatas alas berukuran minimal 3 x 3 meter;

- g) Terhukum harus dalam kondisi sehat (dapat menjalani hukuman cambuk) menurut keterangan dokter;
- h) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan;
- i) Kadar pukulan tidak sampai melukai;
- j) Terhukum laki-laki di cambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atas kepala;;
- k) Pencambukan terhadap wanita hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.
- l) Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terpidana berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.
- m) Terhukum diberikan salinan berita acara sebagai bukti telah menjalankan hukuman.

Dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang pelaksanaan *'uqubat* cambuk disebutkan apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terdakwa dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh ulama atas permintaan jaksa atau terpidana.

Pencambukan akan dihentikan sementara apabila:

- 1) Terpidana luka akibat pencambukan;
- 2) Diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis.
- 3) Terpidana melarikan diri dari tempat pemcambukan sebelum pidana cambuk selesai dilaksanakan. Proses pelaksanaan pidana cambuk ini mengacu pada proses pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dasarnya adalah peristiwa yang terjadi saat eksekusi Maiz yang saat itu ia lari karena tidak tahan atas lemparan batu hukuman rajam. Lalu orang-orang mengejarnya beramai-ramai, setelah tertangkap lalu mereka melempar batu dan akhirnya mati. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau menyesali perbuatan

orang-orang itu dan berkata. “*Mengapa tidak kalian biarkan saja dia lari?*” (H. R Abu Daud dan An-Nasa’i)¹⁸

Banyak hal yang menarik dalam pelaksanaan pidana cambuk di Aceh. Pidana cambuk yang diatur dan dilaksanakan disana merupakan suatu pelajaran moral sebagaimana yang di harapkan dari pelaksanaan hukum pidana Islam dan bukan semata-mata untuk pembalasan.

Pelajaran moral ini dapat terlihat dari awal proses pelaksanaan pidana cambuk di depan umum, sebelumnya aparat yang berwenang mengumumkan pada segenap masyarakat terkait untuk melaksanakan shalat jum’at di mesjid yang ditentukan sebagai tempat pelaksanaan eksekusi cambuk tersebut. Dalam pengumuman dihimbau agar masyarakat hadir untuk melihat proses pelaksanaan hukuman tersebut. Dalam pengumuman juga diumumkan nama si terhukum serta kesalahan yang terpidana lakukan, dan masyarakat diminta untuk mendo’akan agar terpidana diampuni segala dosa dan kesalahan serta kembali ke jalan yang benar.

¹⁸ Anton Widanto, *Mungkinkah Rajam diberlakukan di Aceh?* (<http://www.acehinstitute.org/front-index.htm/AntonWidanto>, diakses pada tanggal 26 April 2017, pukul 09.35 WIB).

D. Peraturan tentang berlakunya Qanun Aceh bagi non Muslim

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, bagi pelaku pelanggaran Syari'at Islam yang beragama non-muslim dikenal adanya penundukan sukarela, bagi pelaku pelanggaran Syari'at Islam yang beragama non-muslim diberikan hak untuk memilih hukum mana yang akan diberlakukan atas dirinya, apakah qanun syari'at Islam Provinsi Aceh, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apakah sanksi pidana cambuk atau sanksi pidana kurungan yang akan dikenakan terhadap dirinya.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan Usaha di Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini berisi tentang penjelasan mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan kesesuaian antara putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Qanun Aceh.

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah

Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 01/JN/2016/MS-TKN

Dalam rangka memperjelas dan memperkuat serta mendukung uraian dari bab-bab yang telah diuraikan di muka, maka dalam bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini penulis menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Perkara Jarimah Khamar dengan Terdakwa Remita Sinaga Alias

Mak Ucok.

a. Kasus Posisi

1. Bahwa Terdakwa adalah Remita Sinaga Alias mak Ucok, berumur 60 Tahun, lahir di Sumatera Utara pada tanggal 27 Desember 1955, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, beragama Kristen Protestan serta berprofesi sebagai pedagang.
2. Bahwa terdakwa menjual minuman keras (*khamar*) di rumahnya di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, minuman keras tersebut dibeli dari salah seorang temannya yang bernama Koko (DPO) yang berada di Kota Medan.
3. Minuman keras tersebut dikirim melalui jasa angkutan umum oleh Saudara Koko, setelah barang tersebut sampai ke Takengon, kemudian terdakwa langsung menyimpan minuman keras tersebut di rumahnya.
4. Penjualan pun cukup berlangsung lama, yakni kurang lebih 15 tahun. Terdakwa mulai menjual minuman keras tersebut semenjak suaminya meninggal dunia.
5. Terdakwa mengetahui bahwa minuman keras tersebut dilarang dalam agama, akan tetapi terdakwa terpaksa menjual barang minuman

keras tersebut disamping berjualan barang-barang kelontong di kios juga untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah dan kuliah anak-anak yang masih dalam tanggungan sebanyak tiga orang dan dua orang sudah berkeluarga.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan *jarimah khamar* sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

c. Fakta Hukum yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan

1. Bahwa Terdakwa Remita Sinaga Alias Mak Ukok pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dengan sengaja menjual khamar.
2. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Nicko Simehate dan saksi Indrajaya yang merupakan anggota Polres Aceh Tengah mendapatkan Informasi dari

masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa menjual minuman keras dirumahnya di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

6. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Nicko Simehate dan saksi Indrajaya kemudian pergi ke tempat dimaksud, sesampai di tempat tersebut kedua saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Polisi dari Polres Aceh Tengah kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa:

- a. 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
- b. 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour;
- c. 8 (delapan) botol besar kecil minuman beralkohol jenis sea horse;
- d. 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus.

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan membelinya dari saudara Koko (DPO) yang berada di kota Medan,

kemudian dikirim melalui jasa angkutan umum, setelah sampai di Takengon Terdakwa kemudian menyimpan minuman keras tersebut di rumahnya dan apabila ada konsumen yang ingin membeli minuman keras tersebut, terdakwa akan menjualnya dengan harga untuk botol besar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan botol kecil Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
9. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari badan POM RI Banda Aceh Nomor: PM. 01.05. 81.16. 04A tanggal 05 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Effiyanti, Apt, M.Si, barang bukti minuman keras jenis anggur merah jenis Columbus milik Terdakwa mengandung kadar Ethanol (jenis alkohol yang bisa dikonsumsi) sebesar 8,80% (delapan koma delapan puluh persen).

d. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon

Aceh Tengah dalam Putusannya Nomor 01/JN/2016/MS-TKN

Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan atas dakwaan yang dimaksud. Sebelum

Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana jarimah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam kesempatan ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang atau tidak untuk mengadili perkara terdakwa Remita Sinaga Alias Mak Ucok yang tersebut dalam identitas lengkap bahwa terdakwa beragama Kristen Protestan.

Bahwa untuk mempertimbangkan fakta ini Majelis Hakim mengemukakan dasar-dasar yuridis:

1. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Sistem Peradilan di Aceh

Ayat (1) : Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Ayat (2) : Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistem hukum Nasional yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

2. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lain di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun;
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan Usaha di Aceh.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang mengadili perkara-perkara Jinayat yang subjek hukumnya beragama non-muslim. Karena itu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-17/Euh.2/TAKNG/02/2016 bertanggal 17 Februari 2016 terhadap Terdakwa Remita Sinaga Alias Mak Ucok dapat dipertimbangkan.

Bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agama Islam yang masing-masing bernama Indrajaya bin Abd.Rahman dan Nicko Simehate bin Drs. Win Ikhwani dan keterangan para saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Bahwa selain saksi-saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menunjukkan barang-barang bukti di muka sidang berupa:

- a. 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
- b. 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour;
- c. 8 (delapan) botol besar kecil minuman beralkohol jenis sea horse;
- d. 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus.

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang miliknya.

Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara Nomor 01/JN/2016/MS-TKN dalam pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Unsur-unsur tindak Pidana dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Majelis Hakim melihat bahwa unsur setiap orang terpenuhi karena Terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku dan di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah identitasnya. Selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya sehingga unsur “*setiap orang*” telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

b. Unsur Perbuatan yang dilarang oleh Syari’at Islam (*Jarimah*)

Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baru dapat dinyatakan sebuah perbuatan jarimah atau suatu kejahatan apabila ada hukum yang mengatur dan menyatakan

bahwa perbuatan itu dilarang. Dalam perkara ini, Terdakwa mengaku beragama Kristen Protestan dan aktifitas terdakwa menjual khamar di Aceh telah diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian, maka unsur “*Jarimah*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dalam hal perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam Majelis hakim juga mengenengahkan hukum Syar’i berdasarkan Firman Allah dalam Al-qur’an Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Surat Al-Maidah ayat 90.

Surat Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q. S. Al-Baqarah: 219).¹

¹Depag RI, Yayasan Penelenggara Penterjemah/pentafsir Al-qur’an: Alqur’an dan Terjemahannya, h, 53

Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q. S Al-Maidah: 90).

c. Unsur dengan sengaja menyimpan atau menjual Khamar

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon

berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Jarimah khamar* dengan sengaja menyimpan dan menjual minuman keras (*khamar*).

2) Menjatuhkan pidana *Uqubat* Cambuk di depan umum sebanyak 6 (enam) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkracht dilaksanakan.

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang

menyebutkan *“Dalam hal tidak ditentukan lain, ‘uqubat Ta’zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh Hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan ‘uqubat yang paling tinggi”*, dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/meminum, menjual atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan”*.

Oleh karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya dituntut ‘uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali di depan umum, yang berarti tuntutan tersebut di bawah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan ‘uqubat yang paling tinggi, maka oleh karena itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri tentang ‘uqubat yang dijatuhkan dalam putusan ini.

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, terdakwa ditahan

maka masa penangkapan/penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat cambuk yang dijatuhkan.

Mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus, 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour. 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse, dan 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus dirampas untuk dimusnahkan.

e. Analisis

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis tiga hal, yakni dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dasar pertimbangan Hakim, dan analisis putusan ditinjau dari sudut pandang Islam.

1. Analisis terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Betuk putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim, berdasarkan pada penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan. Dakwaan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Pasal 13 (KUHP) menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Salah satu wewenang dari Penuntut Umum yaitu membuat surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.

Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada pasal 143 KUHP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan.

1. Syarat Formal

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan:

- 1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa.

- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

2. Syarat Materil

Syarat materil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan, yaitu:

- 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- 2) Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempus delictie dan locus delictie*).

KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap. Namun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memberikan penjelasan tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap.

a. Cermat

Uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

b. Jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana.

Dalam penjelasan pengertian jelas dalam surat dakwaan yaitu menjelaskan tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu.

c. Lengkap

Uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan

tempat tindak pidana itu dilakukan dan dalam dakwaannya juga harus secara lengkap menyebutkan unsur tindak pidana, walau sekecil apapun unsur tersebut.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil, mengakibatkan dakwaan “batal demi hukum”. Berarti, di samping dakwaan menyebut tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, surat dakwaan harus menguraikan secara jelas dan terperinci unsur-unsur konstitutif tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang dilanggar.

Dalam pengambilan keputusan, pihak majelis hakim menjadikan surat dakwaan sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. Disamping surat dakwaan, majelis hakim juga melihat segala yang terbukti dalam pemeriksaan apabila ada sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut.²

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya pada Kasus menjual khamar yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi setiap unsur dalam menyusun dakwaan materilnya. Kasus Mak Ucok tersebut mengenai penjualan miras kepada warga biasa tidak diatur dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai masalah penyalahgunaan Minuman Keras, alkohol atau tindak pidana minuman keraskhususnya menjual Miras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 300, 537 dan pasal 538 KUHP. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 300 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang belum cukup enam belas tahun;

²Lihat, pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukan

Pasal 537 KUHP :

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.”

Pasal 538 KUHP :

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”³

Pasal-pasal KUHP tersebut tidak sesuai dengan kasus yang dilakukan oleh Mak Ucok, maka berlaku hukum yang lebih khusus yaitu Qanun Jinayah dan juga pernyataan dari Kepala Dinas Syari’at Islam Aceh, Prof, Dr. Syahrizal Abbas, M. A, wanita non muslim tersebut dengan sukarela menyerahkan proses pengadilannya kepada pihak Mahkamah Syar’iyah Takengon dan tunduk tanpa paksaan pada aturan

³R. SoenartoSoerodibroto, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 341

hukum jinayah yang berlaku. Hal-hal inilah yang kemudian menjadikan wanita tersebut didakwa sesuai dengan ketentuan syari'at.

2. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim

Pada bagian ini penulis akan menganalisis tentang dasar hukum pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok, dengan cara menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian memecah kedalam unsur-unsur tentang Hukum Jinayat pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- a. Unsur tindak pidana Khamar dalam pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 tahun ayat (1) Qanun aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah:

Pasal 5 huruf (c):

Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lain di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun

Pasal 16 ayat (1):

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling

banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan;

Pada bagian ini, ada tiga unsur yang akan dijelaskan, yakni unsur setiap orang, unsur jarimah, dan unsur menyimpan dan menjual khamar.

1) Unsur setiap orang

Sebagaimana yang dimaksud setiap orang adalah setiap subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya.

Di dalam ilmu hukum pidana, setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam hal ini, Terdakwa tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*). Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa

(*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu. Baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya sehingga unsur “*setiap orang*” telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Khamar dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Fakta perbuatan yang dilakukan Remita Sinaga Alias Mak Ucok adalah menjual atau memperdagangkan khamar.
2. Alat bukti yang mendukung:
 - a. Keterangan dari terdakwa Remita Sinaga Alias Mak Ucok. Bahwa identitas yang terdapat dalam surat dakwaan adalah identitas terdakwa.

b. KTP atas nama Remita Sinaga.

c. Keterangan Saksi Indrajaya dan Nicko Simehate.

Bersdasarkan dari fakta-fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan serta alat-alat bukti yang mendukung, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah sudah sesuai dengan unsur "setiap orang" dengan pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Majelis Hakim juga melihat bahwa Terdakwa tidak pernah merasa keberatan untuk disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon, sejak dari penyidikan hingga ke pengadilan.

2) Unsur Perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam (Jarimah)

Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baru dapat dinyatakan sebuah perbuatan jarimah atau suatu kejahatan apabila ada hukum yang mengatur dan menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang. Dalam perkara ini, Terdakwa mengaku beragama Kristen Protestan dan aktifitas terdakwa melakukan jarimah Khamar di Aceh telah diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian, maka unsur “*Jarimah*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon berpendapat bahwa terdakwa selaku pemeluk agama Kristen Protestan mengetahui menyimpan dan menjual atau memasukkan minuman keras (khamar) adalah dilarang dalam agama dan perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat Aceh khususnya Umat Islam. Dan dalam hal ini juga Hakim mengenengahkan hukum Syar’i yang terdapat pada Al-qur’an Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Surat Al-Maidah ayat 90.

Namun demikian, berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf (c). Maka terhadap perbuatan terdakwa dapat dikenakan ketentuan-ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan hakim dalam putusannya berdasarkan fakta perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam (*Jarimah*) serta alat-alat bukti yang

mendukung terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Qanun Aceh yang berlaku, serta melanggar aturan syari'at Islam. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim terhadap unsur perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam dari perkara ini sudah sesuai.

3) Unsur menyimpan dan menjual Khamar

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan unsur dengan sengaja menyimpan dan menjual khamar dalam perkara ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan hakim selalu mencantumkan aspek yuridis yang meliputi unsur-unsur pasal yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta di muka persidangan dan alat-alat bukti yang sah. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan begitupula kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa sesuai Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Selain tersebut di atas dicantumkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu meliputi aspek di luar aspek yuridis perbuatan terdakwa. Antara lain aspek kemasyarakatan, aspek akibat, aspek pribadi pelaku (umur, belum/pernah dihukum), aspek perbuatan dan aspek psikologis. Beberapa aspek itu harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum maupun sosial seperti hak asasi terdakwa ataupun rasa keadilan masyarakat akan tetapi terdapat hal penting yaitu dipenuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku supaya putusan tersebut sah menurut hukum.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan, dimana dalam menemukan fakta-fakta di persidangan hakim harus menggunakan cara atau sistem pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan dalam menghasilkan keputusan-keputusan dapat terjadi hanyalah dengan adanya perkara yang akan diajukan kepadanya putusan pengadilan menurut output suatu proses peradilan disidang

pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP, disebutkan bahwa Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dikatakan sebagai suatu hal yang dapat menunjukkan kehormatan hakim yang bersangkutan. Bagian pertimbangan menjadi sangat penting karena ini menunjukkan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kasus agar putusan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa harus dengan menghubungkan ancaman pidananya terhadap beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Qanun Aceh telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal dimaksud

diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum jinayat.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana di sebutkan di atas, maka dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah nomor 01/JN/2016/MS-TKN, tindakan hakim telah tepat dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terhadap terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok.

3. Analisis putusan ditinjau dari sudut pandang Islam

Dalam kasus menjual khamar, seperti yang dilakukan oleh Terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok secara khusus tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan dalam sejarah pun penulis tidak menemukan kasus serupa.

- a. Hukuman cambuk yang diterapkan bagi penjual khamar tidak ada dasar hukumnya.

Hukuman Cambuk yang diterapkan kepada pelaku penjual khamar merupakan hukum baru yang hidup di Aceh. Pada prinsipnya, penerapan syari'at Islam ini hanya berlaku bagi pemeluk agama islam

yang berada di Aceh. Namun dalam usaha memperluas penerapan hukum syari'at sebagai hukum yang kompatibel dengan hukum negara, maka penerapan hukum jinayat diberlakukan untuk seluruh masyarakat Aceh.

Pada Masa Rasulullah, beliau pernah memberikan hukuman cambuk (jilid) kepada seorang buruh, hal tersebut berawal dari pengaduan seorang laki-laki kepada Rasulullah yang meminta dari beliau agar memberikan kepastian hukum berdasarkan kitabullah (hukum Al-qur'an) berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh anaknya (sebagai buruh) yang telah berzina dengan istri majikannya. Dan ia telah menebusnya dengan seratus kambing dan seorang pelayan. Lalu Rasulullah memberikan kepada anak laki-lakinya berupa hukuman dera (cambuk) seratus kali dan pengasingan setahun (karena statusnya belum menikah) dan istri tuannya diberikan hukuman berupa rajam berdasarkan perintah Nabi kepada Unais.⁴

Hukuman cambuk (jilid) tetap dilaksanakan bagi pezina sesudah Nabi wafat oleh para sahabat tanpa pandang status sosial di masyarakat. Hal tersebut dialami oleh Abi Syamlah (Putra kedua Umar

⁴Abu Bakar Muhammad, *Hadis Tarbiyah III* (Surabaya: Karya Abitama, 1997), h. 162

bin khattab) yang dicambuk seratus kali sampai meninggal setelah terbukti melakukan perzinahan kepada seorang wanita Yahudi sampai hamil saat ia dalam keadaan mabuk setelah meminum anggur.⁵

Selain itu, Rasulullah juga pernah menyuruh menjilid peminum minuman khamar melihat hadits sebagai berikut:

عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعمان او ابن النعمان شاربا, فأمر رسول الله ص من كان في البيت ان يضربوه فكنت فيمن ضربه فضريناه بالنعال و الجريد. احمد والبخارى

Dari ‘uqbah bin Al-harits, ia berkata, “*Nu’man atau anaknya Nu’man pernah dihadapkan (kepada Nabi SAW) karena minum khamr, lalu Rasulullah menyuruh orang-orang yang di rumah itu supaya memukulnya, maka aku (‘Uqbah) termasuk salah satu yang memukulnya. Kami pukul ia dengan sandal dan pelepah kurma*”. (HR. Ahmad dan Bukhari).

Dalam hadis lain disebutkan,

عن انس ان النبي ص اتى برجل قد ثرب الخمر فجلد بجريدتين نحو اربعين قال وفعله ابو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : اخف ا حدود ثمانين فأمر به عمر. احمد و مسلم وابو داود و الترمذى وصححه

“*Diriwayatkan dar Anas Bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian nabi menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: Dan Abu bakar juga melakukannya (empat puluh*

⁵Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 110-111

kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin 'Auf berkata: seringan-ringannya hudud (batas hukuman meminum minuman khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.” (H.R. Bukhari Muslim).⁶

Dalam hadis lain juga disebutkan,

عن أبي سعيد قال: جلد على عهد رسول الله ص في الخمر بنعلين أربعين. فلما
 زمن عمر جعل بدل كل نعل سوط. رواه أحمد

Dari Abu Sa'id, ia berkata, “*Peminum khamar di zaman rasulullah SAW didera dengan dua sandal sebanyak 40 kali. Kemudian di zaman pemerintahan Umar, masing-masing sandal itu diganti dengan cambuk*”. (HR. Ahmad)

Tentang jumlah pukulan bagi peminum khamar, ulama berbeda pendapat, sebab Rasulullah pun tidak menyebutkan atau memberi batasan tentang bilangan pukulannya. Tidak seperti had zina ghairu muhsan atau had qadzaf. Imam abu hanifah, imam malik, dan ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa had atau hukuman bagi peminum khamar adalah 80 kali jilid. Mereka beralasan bahwa para sahabat telah bermusyawarah menetapkan secara ijma' had atau hukuman bagi peminum khamar.

Hukuman Cambuk Berlaku pula kepada pelaku Qadzaf (menuduh perempuan baik-baik berzina), hal tersebut secara jelas ditetapkan dalam Surat An-Nur ayat 4:

⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dar Normatif ke pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 170

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS an-Nur: 4).

Pada masa rasulullah hukuman Cambuk pernah dijatuhkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang dengan lancangnya memfitnah Siti Aisyah telah berselingkuh dengan Shafwan bin Mu'athal karena melihat Siti Aisyah menunggangi unta milik Shafwan dan Shafwan berjalan kaki menuntun untanya. Hingga setelah sebulan lamanya, kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah yang menyatakan bahwa Siti Aisyah terbebas dari segala tuduhan dan fitnah.⁷

Dari paparan diatas, tidak ditemukan satu riwayat/hadits atau apapun yang dapat memberikan penjelasan bahwa hukuman cambuk pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat kepada penjual *khamar* atau minuman keras. Hukuman cambuk tersebut hanya diberlakukan bagi pezina, peminum khamar, dan pelaku qadzaf. Jika hukuman

⁷Lihat penjelasan dalam QS an-Nuur ayat 23-26

cambuk tidak pernah dijatuhkan kepada penjual khamar yang beragama Islam, apalagi kepada penjual khamar yang bukan Islam.

b. Negara-negara yang memberlakukan Hukum Cambuk

Salah satu negara yang memberlakukan hukum cambuk adalah Arab Saudi (المملكة العربية السعودية), Hakim dapat menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan Meminum/membawa minuman beralkohol, menghina Islam melalui saluran Elektronik, berduaan dengan yang bukan mahramnya, perzinahan, perempuan yang menyetir mobil, homoseksual, dan mengganggu wanita.

Jika dilihat secara teliti, hukuman cambuk yang diberlakukan di Saudi Arabia ini, tidak seluruhnya diatur dalam Alqur'an dan Hadits. Seperti, menghina Islam melalui saluran Elektronik, berduaan dengan yang bukan mahram, perempuan yang menyetir mobil, dan mengganggu wanita.

Adapun di Malaysia, perbuatan yang dapat dikenakan ancaman hukuman cambuk adalah meminum minuman beralkohol, perzinahan, dan pemerkosaan.

Sementara di Singapura, perbuatan yang dapat dijatuhkan ancaman hukuman cambuk oleh Mahkamah Syar'iyah

adalah: Pelanggaran narkoba, perampokan, pidana terkait seks, pembunuhan, kepemilikan senjata tidak sah, vandalisme (perusakan secara ganas terhadap hasil karya seni, barang berharga, keindahan alam, dsb), kerusuhan, peminjaman uang secara ilegal, orang asing yang melewati batas tinggal di Singapura hingga 90 hari (untuk menghindari keberadaan pekerja imigran ilegal).⁸

Negara Singapura juga menerapkan hukuman cambuk tidak seluruhnya berdasarkan hukum Islam, seperti kepemilikan senjata tidak sah, vandalisme, kerusuhan, peminjaman uang secara ilegal, Orang asing yang melewati batas tinggal di negaranya

Iran, juga merupakan negara yang menetapkan Hukum cambuk sebagai bentuk hukuman. Adapun perbuatan yang diancam hukuman cambuk antara lain, meminum miras, makan dan minum ditempat umum selama bulan Ramadhan, penghinaan terhadap pejabat, bersalaman dengan lawan jenis, memelihara anjing, dan menggunakan fasilitas dan sumber daya negara untuk melawan atau mendukung seorang kandidat presiden, dsb.⁹

⁸Kaskus, *Hukuman Cambuk di Singapura*, 2016

⁹Faisal Assegaf, *Hukuman cambuk di Iran*, (Al-Balad, 2016).

Sama halnya dengan negara-negara yang dipaparkan sebelumnya, Iran juga memberlakukan hukuman cambuk tidak seluruhnya berdasarkan hukum Islam. Seperti, makan dan minum ditempat umum selama bulan Ramadhan, penghinaan terhadap pejabat, bersalaman dengan lawan jenis, memelihara anjing, dan menggunakan fasilitas dan sumber daya negara untuk melawan atau mendukung seorang kandidat presiden, dsb.

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menganggap hukuman cambuk yang dijatuhkan oleh Mahkamah syar'iyah Takengon terhadap terdakwa sebagai pelaku menjual khamar adalah hukum yang bersifat ijtihadi.

B. Kesesuaian antara Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah

Takengon dengan Qanun Aceh

Sebelum penulis menyesuaikan Putusan hakim Mahkamah Syari'iyah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN, penulis terlebih dahulu akan memparkan istilah Hakim dalam Bahasa Hukum Indonesia, yaitu orang yang mengadili perkara di dalam Pengadilan. Adakalanya juga istilah hakim dipakai terhadap orang yang budiman, ahli, orang bijaksana. Di dalam hukum acara, hakim berarti pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam

melaksanakan peradilan, memeriksa dan memutus perkara hakim itu terjamin kebebasannya, ia tidak boleh berada di bawah pengaruh siapapun. Bahkan ketua pengadilan tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilakukannya. Hakim bertanggungjawab sendiri dan bertanggungjawab pada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah diambilnya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum. Jika aturan hukum tidak ada, ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas, ia harus menafsirkannya dan jika tidak ada hukum tertulis, ia dapat menggunakan hukum adat.¹⁰

Putusan yang baik lahir dari keinginan yang kuat dari hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cermat serta teliti dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis tergerak untuk mengkaji lebih dalam proses intelektual yang dilalui hakim ketika memutus suatu perkara.

Sebagaimana yang dimaksud dengan Putusan ialah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2004), h. 144

perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya di antara para pihak serta putusan seperti apa yang dijatuhkan.¹¹

Hasil penelitian terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 01/JN/2016/MS-TKN, dimana dalam kasus tersebut yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon terkait perkara tindak pidana Khamar yang dilakukan oleh Remita Sinaga Alias Mak Ucok merupakan sebagai tersangka yang diduga menyimpan dan menjual Khamar di wilayah hukum Kota Takengon. Dimana di dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman Cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali di depan umum. Sebagaimana Mahkamah Syar'iyah Takengon merupakan Lembaga Peradilan yang berwenang dalam memutus perkara tersebut.

Dari penjelasan tersebut penulis akan menguraikan bahwa hakim dalam memberi putusan berdasarkan adanya penafsiran dalam penemuan hukum melalui pertimbangan-pertimbangannya. Yaitu melalui proses nalar yang digunakan hakim hingga sampai kepada kesimpulan tersebut.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan. Setelah fakta

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 13

tersebut terungkap, maka hakim akan menemukan hukumnya. Proses ini dalam bahasa hukum dikenal dengan proses *mengkonstatir*, *mengkualifisir*, dan *mengkonstituir*. Proses penemuan hukum oleh hakim apat dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis (*the living law*), yurisprudensi, traktat, dan doktrin ilmu pengetahuan.

Penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah, dan menemukan hukum (dalam arti perundang-undangan dan sumber hukum lain) terhadap satu atau beberapa peristiwa atau fakta hukum (pokok perkara) untuk kemudian menetapkan suatu kaidah hukum yang baru atau menetapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa atau fakta hukum yang baru atau fakta hukum yang baru tersebut. Penemuan hukum tidak hanya dalam konteks ingin menemukan kaidah hukum baru. Karena kaidah hukum lama tidak berarti *out to date* (usang), karena masih terdapat kemungkinan diterapkan pada peristiwa hukum yang baru. Kaidah lama yang masih mungkin diterapkan biasanya bersifat kaidah hukum sehingga cakupan berlakunya lebih luas, baik dari segi waktu maupun konteks suatu perkara.

Dari pemaparan tersebut maka maksud dari tiga tahapan dalam penemuan hukum diantaranya:

1. *Mengkonstatir*, yaitu (menentukan, memilah) oleh hakim terhadap peristiwa atau fakta hukum yang menjadi persengketaan di antara para pihak (pokok perkara).
2. *Mengkualifisir*, yaitu proses mencari, menelaah, dan menemukan hukum (dalam arti perundang-undangan dan sumber hukum lain) yang relevan dengan pokok perkara.
3. *Mengkonstituir*, yaitu menciptakan kaidah hukum baru terhadap peristiwa hukum tersebut atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa hukum tersebut.

Pada dasarnya yang dilakukan hakim pada persidangan adalah *mengkonstatir* (membuktikan) peristiwa konkret yang sekaligus berarti merumuskan peristiwa konkret, kemudian *mengkualifisit* peristiwa konkret yang berartimenetapkan peristiwa hukum dan peristiwa konkret, terakhir *mengkonstituir* yaitu memberi hukum atau menerapkan hukum.

Ketiga tahap di atas sama dengan yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Yaitu, *konstatir*, *kualifisir*, dan *konstituir*.

a. Tahap Mengkonstatir

Dalam tahap ini, hakim berusaha untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa konkret pada perkara pidana Khamar yang

terdapat dalam putusan Nomor 01/JN/2016/MS-TKN dalam kasus ini, hakim mendapat keterangan langsung dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Remita Sinaga Alias Mak Ucok, usia 60 tahun, dan beragama Kristen Protestan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan jinayah berupa menyimpan dan menjual *khamar*, dan benar terdakwa ditangkap oleh saksi Nicko Simehate dan saksi Indrajaya yang merupakan anggota polisi dari Polres Aceh Tengah pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh tengah karena menjual minuman keras seperti barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim di muka sidang.

Bahwa berdasarkan keterangan selanjutnya, terdakwa mulai menjual minuman keras tersebut semenjak suami terdakwa meninggal dunia yaitu sekitar 15 tahun yang lalu. Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan membelinya dari saudara Koko (DPO) yang berada di kota Medan, kemudian dikirim melalui jasa angkutan umum, setelah barang tersebut sampai di Takengon, terdakwa menyimpan minuman keras tersebut di rumahnya dan apabila ada konsumen yang ingin membeli minuman keras tersebut, terdakwa akan menjualnya

dengan harga untuk botol besar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan harga botol kecil Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk mengetahui kebenaran keterangan dari Jaksa Penuntut Umum di atas, maka hakim memastikan dengan meminta keterangan dari saksi Indrajaya bin Abd. Rahman dan Nicko Simehate bin Drs. Ikhwani yang merupakan anggota Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa menjual minuman keras di rumahnya di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh tengah. Berdasarkan keterangan informasi tersebut, saksi Indrajaya bin Abd. Rahman dan Nicko Simehate bin Drs. Win Ikhwani kemudian pergi ke tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut, kedua saksi bersama-sama dengan beberapa anggota polisi dari Polres Aceh Tengah kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa.

Selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil tuntutan Jaksa, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, diantaranya sebagai berikut:

- a. 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek *Columbus*;

- b. 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah *vigour*;
- c. 8 (delapan) botol besar kecil minuman beralkohol jenis *sea horse*;
- d. 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek *Columbus*.

Dan selama persidangan berlangsung, tidak di temukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak bisa dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman.

Uraian tentang fakta konkrit yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum serta bukti-bukti yang diajukan itulah yang disebut dengan proses konstataasi atau *konstatir*, yaitu membuktikan kebenarannya sehingga dapat dipastikan kebenaran dari peristiwa konkritnya.

b. Tahap mengkualifisir

Dalam tahap ini hakim menetapkan hukumnya dari peristiwa konkrit yang telah dibuktikan (*konstatir*). Ketika peristiwa konkrit telah dianggap benar-benar terjadi, maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit tersebut, mana yang peristiwa hukum dan mana yang bukan.

Jika peristiwanya sudah terbukti dan hukumnya sudah jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi kemudian jika peraturan hukumnya tidak jelas, maka disinilah hakim harus menemukan hukumnya. Tentu saja dalam melakukan hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undang yang berlaku.

Peristiwa konkrit yang sudah dikonstatir tersebut kemudian harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum dengan mencari peraturan dan menemukan hukumnya.

Melihat pada kasus, bahwa terdakwa melakukan *jarimah khamar* yaitu menyimpan dan menjual *khamar* dengan sengaja di rumahnya, di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Melihat fakta tersebut dan semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti di muka sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jarimah khamar dengan sengaja menyimpan dan menjual minuman keras (*khamar*). Maka kualifikasinya adalah menyimpan dan menjual *khamar* (peristiwa hukum).

c. Tahap Mengkonstituir

Proses tahap konstatir dan kualifikasi sudah dilaksanakan sehingga jelas peristiwa dan peraturan hukumnya. Kemudian tinggal bagaimana hakim harus memutuskannya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya terhadap peristiwa konkritnya, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum.

Melihat pada kasus, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Khamar* dengan sengaja menyimpan dan menjual minuman keras (khamar).

Bahwa dalam pemeriksaan dimuka sidang Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenaran atau alasan pemaaf bagi terdakwa, dimana terdakwa telah dewasa, cakap dan mampu bertanggungjawab dengan segala perbuatannya. Maka oleh karenanya, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya.

Bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan

- a. Bahwa terdakwa selaku pemeluk agama kristen protestan mengetahui menyimpan dan menjual atau memasukkan minuman keras (khamar) adalah dilarang dalam agama dan perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat Aceh khususnya umat Islam;
- b. Bahwa aktifitas terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras (khamar) sudah lama berlangsung yaitu sejak 15 tahun yang lalu.

2. Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa bersikap sopan, mengaku ters terang di muka sidang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Sehingga perkara tersebut dihubungkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berulaku khususnya Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Jinayat yaitu Majelis Hakim menyatakan terdakwa Remita Sinaga Alias mak Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan jinayat menyimpan dan menjual khamar), menghukum terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok oleh karena itu dengan ‘uqubat ta’zir 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan, menyatakan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek columbus, 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour, 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse, dan 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus di rampas untuk dimusnahkan.

Dalam putusan tersebut diatas jelas bahwa dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang dalam setiap keputusan. Yakni putusan tersebut harus mempunyai pertimbangan dengan alasan-alasan berupa dasar-dasar hukum dan pasal-pasal

peraturan yang bersangkutan, serta argumentasi dan kesimpulan yang jelas dan mudah dimengerti orang yang membacanya. Sehingga putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN sudah sesuai dengan Qanun Aceh.

Untuk memperjelas prosesnya, Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan 'uqubat ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum. Berdasarkan pasal 7 nomor tahun 2014 yang menyebutkan *"Dalam hal ditentukan lain, 'uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'uqubat yang paling tinggi"*. Putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan *"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan"*.

Sehingga setelah melihat kesesuaian antara putusan maka penulis menguraikan secara singkat putusan tersebut telah memiliki kepastian hukum, sebagaimana secara sederhana kepastian hukum adalah

kepastian yang dilahirkan berdasarkan bunyi dari teks undang-undang dipandang sebagai patronase tunggal untuk mengukur suatu keadaan, kejadian, atau ketetapan sebagai mengandung kepastian hukum. Sesuatu dikatakan pasti secara hukum jika dan hanya jika memenuhi segala unsur bunyi dalam undang-undang. Jika sedikit saja keluar dari bunyi atau makna dari undang-undang tersebut, maka unsur dan nilai kepastiannya menjadi tidak lengkap, berkurang, bahkan hilang sama sekali.

Dalam putusan yang penulis teliti selalu diawali dengan peraturan perundang-undangan, itulah yang menunjukkan kepastian hukumnya.

Pada kondisi tertentu, hakim bahkan dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (hukum dalam arti undang-undang), karena hukum yang ada tidak lagi mencerminkan atau mempresentasi nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini mengemukakan bahwa hakim sejatinya bukanlah mulut peraturan hukum atau undang-undang pada umumnya. Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata, hakim lebih jauh merupakan mulut kepatutan, keadilan, kepentingan dan ketertiban umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan:

1. Mahkamah Syar'iyah Takengon memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, dan beberapa barang bukti. Sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman cambuk 30 kali dimuka umum.

Hukuman cambuk ini berbeda dengan hukuman cambuk yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Baik pada masa Nabi, masa sahabat, maupun di negara lain yang memberlakukan hukuman cambuk.

2. Berdasarkan aspek subjek hukum, antara Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Qanun Aceh telah sesuai. Karena dalam Putusan tersebut yang dijadikan subjek hukum ialah setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun.

Berdasarkan aspek yang dilarang telah sesuai, karena yang dilarang didalam keduanya adalah *jarimah khamar*, yakni dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar.

Berdasarkan aspek hukum/sanksi atas pelanggaran menyimpan dan menjual khamar telah sesuai, karena dalam Putusan tersebut hukuman yang diberikan tidak lebih dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1).

B. Saran

Sebagai pelengkap dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran yang berupa saran, yaitu:

Pemerintah Aceh khususnya Kota Takengon lebih giat lagi dalam memberi sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka menyadari bahwa *khamar* dan *jarimah* lainnya dapat merusak tatanan hidup, baik pribadi maupun sosial. Kepada masyarakat umum, hendaknya lebih berperan aktif dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat lain. Dan bagi akademisi, agar dapat

menjadikan penelitian ini sebagai jalan untuk meneliti lebih dalam tentang putusan-putusan Mahkamah syar'iyah ataupun putusan pengadilan lainnya yang ada di provinsi Aceh. Penelitian ini juga mengandung harapan agar provinsi lain dapat menjadikan aceh sebagai contoh dalam mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abubakar, Al-Yasa, *Bunga Rampai Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Abubakar Al-Yasa', Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Abubakar Al-Yasa, *Sekilas Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006.
- Abubakar,Al-Yasa',*Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, Juz 2*.
- Al-Asqalani Al-Hafidz ibn Hajar, *Bulugh alMarram Fi Adillati al-Ahkam*,Bairut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah.
- Ali Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ash-Shiddieq TM. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asnawi, M. Natsir,*Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Asy-Syarbashi Ahmad, *Yas'akunaka: Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera, 1997.
- Azra Azumardi, *Islam dan Masalah-masalah kemasarakatan*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

- Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2001.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta: al-Mahira, 2010.
- Bisri A. Musthafa, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya: Khalista, 2005.
- Depag RI, *Yayasan Penelenggara Penterjemah/pentafsir Al-qur'an: Alqur'an dan Terjemahannya*.
- Din,Mohd. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaa Panji Mas, 1999.
- Hadikusuma, Hilman *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2004
- Mamuji, Sri *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mardanai, *Penyalahgunaan Narkoba dalam prespektif hukum Islam dan hukum pidana Nasional*
- Muchsin, Misri A. dkk, *Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- Mudjib Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1992.
- Muhammad Abu Bakar, *Hadis Tarbiyah III*, Surabaya: Karya Abitama, 1997.
- Musthafa K.S, *Alkohol Dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*, Bandung: PT. Al_Ma'arif.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dar Normatif ke pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas.

Soerodibroto, Soenarto, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Subagyo, P. Koko *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991.

Sufriana, H. Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama dalam sistem Peradilan Indonesi* Bandung: PT Refika Aditama, 2015

Tippe, Syafruddin *Aceh di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000

Warson Munawwir Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997

Skripsi/thesis:

Husaini, "*Cambuk Sebagai bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat)*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Sherly Herdiyanti, "*Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Maisir (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*." Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Willy Purnamasari, "*Efektifitas regulasi hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana minum-minuman keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Undang-Undang/Qanun:

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam BAB III Kekuasaan dan Kehakiman Mahkamah Pasal 49.

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (1) dan (2) tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 tahun 2002 Pasal 2 ayat 1, Tentang Peradilan Syari'at Islam.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Pasal 125 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Bab III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Bab III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Bagian Ketiga Pasal 6-7

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Bab III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Bagian kelima Pasal 9.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab V Pasal 18.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Pasal 126 ayat (1).

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam Pasal 1.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam Bab VII Ketentuan Pidana Pasal 23.

Penjelasan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dalam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syi'ar Islam.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam
Pasal 2.

Internet:

Yudi Rchman, *Nonmuslim Dihukum Cambuk, KY Pelajari Putusan Mahkamah Syariah*, http://kbr.id/04/2016/nonmuslimdihukum_cambuk_ky_pelajariputusanmahkamah_syariah/80349.html, diakses pada tanggal 31 januari 2017 pukul 07.50 WIB.

Widanto Anton, *Mungkinkah Rajam diberlakukan di Aceh?* <http://www.acehinstitute.org/front-index.htm/AntonWidanto>, diakses pada tanggal 26 April 2017, pukul 09.35 WIB.

PUTUSAN

Nomor 0001/JN/2016/MS-Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Remita Sinaga Alias Mak Ucok**
Tempat lahir : Sumatera Utara
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 27 Desember 1955
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 01/Pen-JN/2016/MS-Tkn tanggal 22 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka sidang;

Memperhatikan tuntutan pidana jaksa penuntut umum tanggal 11 Maret 2016 dengan Nomor PDM-17/Euh.2/TAKNG/13/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jinayat "Menjual Khamar" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 6 (enam) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkracht dilaksanakan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
 - 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour;
 - 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse;
 - 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah pula mendengar Nota pembelaan/tanggapan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka sidang yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan dari hukuman dan jangan dicambuk;

Setelah pula mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang secara lisan disampaikan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa pada dasarnya Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya Nomor PDM-17/Euh.2/TAKNG/02/2016 bertanggal 17 Februari 2016 telah didakwa melakukan perbuatan Jarimah Khamar sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya didalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, saksi *Nicko Simehate* dan saksi *Indrajaya* yang merupakan Anggota Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa menjual minuman keras di rumahnya di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi *Nicko Simehate* dan saksi *Indrajaya* kemudian pergi ke tempat dimaksud, sesampai di tempat tersebut kedua saksi bersama-sama dengan beberapa anggota polisi dari Polres Aceh Tengah kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
 - 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour;
 - 8 (delapan) botol besar kecil minuman beralkohol jenis sea horse;
 - 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan membelinya dari saudara Koko (DPO) yang berada di Kota Medan, kemudian dikirim melalui jasa angkutan umum, setelah sampai di Takengon Terdakwa kemudian menyimpan minuman keras tersebut di rumahnya dan apabila ada konsumen yang ingin memberi minuman keras tersebut,

Terdakwa akan menjualnya dengan harga untuk botol besar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan botol kecil Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh Nomor : PM. 01.05. 81.16. 04A tanggal 05 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh *Dra. Effiyanti, Apt, M.Si*, barang bukti minuman keras jenis anggur merah merek Columbus milik Terdakwa mengandung kadar Ethanol (jenis alcohol yang bisa dikonsumsi) sebesar 8,80 % (delapan koma delapan puluh persen);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan membenarkan atas dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemukakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi ia menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dari tindak pidana jarimah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam kesempatan ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang atau tidak untuk mengadili perkara terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* yang tersebut dalam identitas lengkap bahwa Terdakwa beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan fakta ini, Majelis Hakim mengemukakan dasar-dasar yuridis sebagai berikut :

1. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001;

- (1). Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari system Peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
- (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Syari'at Islam dalam system hukum Nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh antara lain sebagai berikut :
 - Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlaku untuk :
 - a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
 - b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memiliki serta ~~menandatangani di bawah sukarela pada Hukum Jinayat,~~
 - c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi di atur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014;
 - d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang mengadili perkara-perkara Jinayat yang subjek hukumnya beragama non Muslim. Karena itu, surat dakwaan jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-17/Euh.2/TAKNG/02/2016 bertanggal 17 Februari 2016 terhadap Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agama Islam yang masing-masing bernama *Indrajaya bin Abd. Rahman* dan *Nicko Simehate bin Drs. Win Ikhwani* dan keterangan para saksi tersebut selengkapny sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menunjukkan barang-barang bukti di muka sidang berupa:

- 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
- 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour;
- 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse;
- 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Nicko Simehate dan saksi Indrajaya yang merupakan anggota Polres Aceh Tengah pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB di Rumah Terdakwa di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten aceh Tengah karena menjual minuman keras seperti barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di muka sidang dan Terdakwa mengakuinya barang tersebut miliknya yang dibeli dari Koko di Medan;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman keras tersebut semenjak suami Terdakwa meninggal dunia yaitu sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa minuman keras tersebut dilarang dalam agama, akan tetapi Terdakwa terpaksa menjual barang minuman keras tersebut disamping berjualan barang-barang kelontong di kios juga untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah dan kuliah anak-anak yang masih dalam tanggungan sebanyak tiga orang dan dua orang sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan larangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti serta petunjuk, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ulok* pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, dengan sengaja menjual minuman keras (khamar) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi *Nicko Simehate* dan saksi *Indrajaya* yang merupakan Anggota Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa menjual minuman keras di rumahnya di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi *Nicko Simehate* dan saksi *Indrajaya* kemudian pergi ke tempat dimaksud, sesampai di tempat tersebut kedua saksi bersama-sama dengan beberapa anggota polisi dari Polres Aceh Tengah kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa :

- 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
- 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour;
- 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse;
- 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan membelinya dari saudara Koko (DPO) yang berada di Kota Medan, kemudian dikirim melalui jasa angkutan umum, setelah sampai di Takengon Terdakwa kemudian menyimpan minuman keras tersebut di rumahnya dan apabila ada konsumen yang ingin memberi minuman keras

tersebut, Terdakwa akan menjualnya dengan harga untuk botol besar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan botol kecil Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh Nomor : PM. 01.05. 81.16. 04A tanggal 05 Januari 2016 yang ditandatangani oleh *Dra. Effiyanti, Apt, M.Si*, barang bukti minuman keras jenis anggur merah merek Columbus milik Terdakwa mengandung kadar alkohol sebesar 8,80 % (delapan koma delapan puluh persen);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka sidang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal Qanun tentang Hukum Jinayat yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa melanggar Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah setiap subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan

kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari Terdakwa yang termuat didalamnya dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sehingga unsur "*setiap orang*" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, Terdakwa mengaku beragama Kristen Protestan, namun demikian berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf c yang menyebutkan bahwa, "*Qanun ini berlaku untuk setiap orang beragama bukan islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini*". Maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dikenakan ketentuan-ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian tentang unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam (Jarimah)

Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baru dapat dinyatakan sebuah perbuatan Jarimah atau suatu kejahatan apabila ada hukum yang mengatur dan menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang. Dalam perkara ini, Terdakwa mengaku beragama Kristen Protestan dan aktifitas Terdakwa melakukan jarimah khamar di aceh telah diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian maka unsur "*Jarimah*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Dengan sengaja menyimpan atau menjual khamar

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi *Indrajaya bin Abd. Rahman* dan *Nicko Simehate bin Drs. Win Ikhwani*

yang merupakan anggota Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa menjual minuman keras dirumahnya di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi *Indrajaya bin Abd. Rahman* dan *Nicko Simehate bin Drs. Win Ikhwani* kemudian pergi ke tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut, kedua saksi bersama-sama dengan beberapa anggota polisi dari Polres Aceh Tengah kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa :

- 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus
- 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour
- 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse
- 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus

Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Koko (DPO) yang berada di kota Medan, kemudian dikirim melalui jasa angkutan umum, setelah sampai di Takengon Terdakwa kemudian menyimpan minuman keras tersebut di rumahnya dan apabila ada konsumen yang ingin membeli minuman keras tersebut, Terdakwa akan menjualnya dengan harga untuk botol besar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan botol kecil Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, menimbun atau menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh Nomor : PM.01.05.81.01.16.04A tanggal 05 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh *Dra. Effiyanti, Apt., M.Si.* barang bukti minuman keras jenis anggur merah merek Columbus milik Terdakwa, mengandung kadar Ethanol (jenis alcohol yang bisa dikonsumsi) sebesar 8.80% (delapan koma delapan puluh persen). Dengan demikian tentang unsur "*dengan sengaja menyimpan*

atau menjual khamar" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti di muka sidang, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Jarimah khamar* dengan sengaja menyimpan dan menjual minuman keras (khamar);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka sidang, Majelis Hakim tidak menemukan pada Terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran maupun pema'af bagi Terdakwa, dimana Terdakwa telah dewasa, cakap dan mampu untuk bertanggungjawab dengan segala perbuatannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- Hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa selaku pemeluk agama Kristen Protestan mengetahui menyimpan dan menjual atau memasukkan minuman keras (khamar) adalah dilarang dalam agama dan perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat Aceh khususnya Umat Islam;
- Bahwa aktifitas Terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras (khamar) sudah lama berlangsung yaitu sejak 15 tahun yang lalu;

- Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang di muka sidang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan "*Dalam hal tidak ditentukan lain, 'uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh Hakim adalah ¼ (seperempat) dari ketentuan 'uqubat yang paling tinggi*", dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan "*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/meminum, menjual atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan*";

Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan *Jarimah Khamar*, yaitu dengan cara menyimpan dan menjual minuman keras (khamar). Namun oleh karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya dituntut 'uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali di depan umum, yang berarti tuntutan tersebut dibawah ¼ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi, maka oleh karena itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri tentang 'uqubat yang akan dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, Terdakwa ditahan maka masa penangkapan/ penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat cambuk yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;

- 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour;
- 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse;
- 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 219 dan Surat Al-ma'idah ayat 90;

Memperhatikan pula peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan jinayat (*Menyimpan dan Menjual Khamar*);
2. Menghukum Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* oleh karena itu dengan 'Uqubat Ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
 - 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour;
 - 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse;

- 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. T. Syarwan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon selaku Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Abdul Ghoni S, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1437, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Dra. Yusniar Usman selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Rudi Hermawan, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

Dra. Sumarni.

Dto

Abdul Ghoni S, SH, MH.

Ketua Majelis,

Dto

Drs. T. Syarwan.

Panitera Pengganti,

D.to

Dra. Yusniar Usman